



A B C D E

F G H I J K

L m N o p

Q R S T U

**POTRET DEMOKRASI:  
REVIEW DAN REPOSISI**  
STUDI OBSERVASI TIPOLOGI  
ALUMNI CEFIL PANJANG



SATUNAMA  
Stichting Adenauer Nederland



Konrad  
Adenauer  
Stiftung

**YAYASAN SATUNAMA**

Yogyakarta

April 2014

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi tanpa izin tertulis dari Penerbit

Judul:

**Potret Demokrasi: Review dan Reposisi  
(Studi Observasi Tipologi Alumni CEFIL Panjang)**

Diterbitkan oleh:

**Yayasan SATUNAMA**

bekerjasama dengan

**Konrad Adenauer Stiftung**

Jl. Sambi Sari 99, Duwet Rt.07/34

Sendangadi, Mlati, Sleman

Yogyakarta 55285

Telp. (0274) 867745-47, 869045

Fax. (0274) 869044

E-mail: [cefil@satunama.org](mailto:cefil@satunama.org)

[satunama@satunama.org](mailto:satunama@satunama.org)

Website: [www.satunama.org](http://www.satunama.org)

[www.cefil.info](http://www.cefil.info)

ISBN:

# DAFTAR ISI

---

Daftar Isi	i
Sekapur Sirih	ii
Mengapa CEFIL?	1
Studi Observasional: Review dan Reposisi	5
Temuan	12
Arena Politik Lokal	40
Kesimpulan	60
Rekomendasi	63
Kepustakaan	66

---

## **Penanggung Jawab**

Budi Susilo

## **Penulis**

Willy Purna Samadhi, AE. Priyono  
Insan Kamil, Eny Setyaningsih

## **Editor**

Nunung Qomariyah

## **Perwajahan**

Dimas Wijanarko

## **Peneliti**

AE. Priyono, Willy Purna Samadhi,  
Insan Kamil, Sana Ullaili, Bima Sakti,  
Apifudin Toha, Eny Setyaningsih,  
Denny Tarigan, Laurentia Widianti,  
Shanti Ardha Chandra

Foto-foto: Dok. SATUNAMA

## SEKAPUR SIRIH STUDI OBSERVASI: IDE UNTUK PERUBAHAN

Pelaksanaan pelatihan Civic Education for Future Indonesian Leaders (CEFIL) telah berlangsung sejak tahun 1998 – hingga sekarang (dan yang akan datang). Bentuk pengamatan yang mendalam atas CEFIL berupa Studi Observasi alumni secara terstruktur baru dilakukan pertama kali pada tahun 2013 – 2014 (September 2013 hingga Februari 2014). Pilihan berupa Studi Observasi alumni CEFIL didasarkan pada rentang pelatihan dan dinamika perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yaitu 1998 – 2008; satu dekade.

Kami berharap bahwa hasil Studi Observasi dapat menjadi sebuah teleskop untuk melihat secara bening-jernih tentang:

- Dinamika gerakan kewargaan dalam tipologi alumni CEFIL;
- Konteks sosial - ekonomi - politik sebagai pijakan pengembangan agenda - agenda demokratisasi pasca 2014.

Oleh karena itu, semoga hasil Studi Observasi alumni CEFIL dapat menghadirkan inspirasi bagi diskusi-diskusi lebih lanjut tentang kehidupan sosial-politik-budaya-ekonomi, khususnya di tahun PEMILU ini, demi penataan demokrasi yang lebih baik di masa depan.

Terima kasih atas segala bentuk dukungan dari semua pihak, khususnya alumni

CEFIL, selama proses Studi Observasi, baik dalam pengisian kuesioner, interview dan focus group discussion. Apresiasi yang sangat besar atas kerjasama yang sangat istimewa dari tim Studi Observasi (Willy Purna Samadhi, Insan Kamil, Eny “imin” Setyaningsih, Shanti Ardha Chandra, Apifudin Toha, Bima “kuru” Sakti, Danny Tarigan, Laurentia Widianti, Sana Ulailli dan semua enumerator) dan analis (AE. Priyono dan Meth. Kusumahadi) yang memberikan tinjauan masa depan dari data-data yang telah diperoleh.

Ucapan terima kasih juga kami haturkan atas dukungan yang penuh persahabatan dari Konrad Adenauer Stiftung (KAS), khususnya Dr. Jan Woischnik sebagai representative KAS Indonesia – Timor Leste, merupakan bentuk kerjasama yang tak ternilai dalam proses pelaksanaan CEFIL dan Studi Observasi ini.

SATUNAMA mengajak anda untuk mencermati hasil Studi Observasi ini secara teliti dan bijak. SATUNAMA percaya bahwa hasil Studi Observasi alumni CEFIL akan menghadirkan pemikiran orisinal yang dapat memberi pencerahan bagi kita. Semoga kita dapat memetik hal penting untuk perubahan demi penguatan demokrasi Indonesia.

Budi Susilo  
Ketua SATUNAMA

## MENGAPA CEFIL?

Demokrasi dan *civil society* telah menjadi tema-tema kunci dalam wacana politik di negara-negara seperti Indonesia yang baru saja lepas dari cengkeraman otoritarianisme. Keduanya memiliki relasi yang kuat dan satu sama lain saling mendukung. Di satu sisi *organized civil society* sebagai artikulator dan agregator kepentingan-kepentingan publik memiliki peran signifikan bagi pengembangan demokrasi. Di sisi lain, demokrasi membutuhkan kehadiran *civil society* agar demokrasi tidak terjatuh ke dalam pelukan kelompok elit dominan. Kelompok yang disebut terakhir itu memang tidak selalu anti-demokrasi, tetapi cenderung mengambil keuntungan sepihak dari struktur kesempatan politik yang melekat pada sistem demokrasi. Untuk mengatasi hal

itu, *civil society* harus berperan mencegah demokrasi menjadi ruang kontestasi yang eksklusif bagi para elit, dan pada saat yang sama membangun demokrasi sebagai arena yang inklusif bagi seluas-luasnya warga negara untuk berpartisipasi secara politik dalam memperjuangkan apa yang disebut kepentingan-kepentingan publik.

Berangkat dari pemikiran tersebut, SATUNAMA memandang penting kehadiran aktor-aktor di kalangan masyarakat sipil yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang memadai untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi.

Pada tahun 1997, SATUNAMA mengadakan *workshop* di kota Yogyakarta untuk merancang pendidikan kepemimpinan bagi kalangan aktivis masyarakat sipil. Forum itu dihadiri oleh 75



Foto bersama di akhir pelatihan sebagai momentum persabatan dan solidaritas gerakan civil society Indonesia.

## CEFIL DALAM SEJARAH SATUNAMA

aktivis LSM yang berpengalaman dalam melakukan perlawanan demokratik terhadap pemerintah rezim Soeharto. Hasilnya adalah penyatuan gagasan dan terbangunnya kesepakatan untuk merancang program Pendidikan Kepemimpinan dan Demokrasi bagi Pemimpin Masyarakat Sipil, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Civic Education for Future Indonesian Leaders* (CEFIL). Pada tahun berikutnya diselenggarakan pelatihan CEFIL yang pertama, kemudian dilanjutkan secara berkala dengan berbagai variasi materi maupun kelompok sasaran.

Dimulainya pelatihan CEFIL pada 1998 sekaligus juga menandai era baru SATUNAMA. Pada era sebelumnya, SATUNAMA lebih banyak bekerja dengan pendekatan dan model karitatif, yaitu dengan memberikan pendampingan dan bantuan langsung misalnya orang-orang miskin di desa dan kelompok-kelompok marjinal yang lain. Pada fase berikutnya SATUNAMA beralih pada pendekatan pembangunan, yaitu mulai melibatkan diri untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan melaksanakan agenda - agenda



Role play analisis kelas dalam sesi analisis sosial.



advokasi kebijakan publik. Kedua pendekatan ini terutama dijalankan SATUNAMA pada saat rezim Soeharto berkuasa. Di saat-saat menjelang kejatuhan Soeharto dan masa awal transisi demokrasi Indonesia dari Habibie, Gus Dur hingga Megawati, SATUNAMA kembali mengubah pendekatan yaitu dari model pembangunan ke model pemberdayaan.<sup>1</sup> Model yang terakhir itu ditandai dengan keterlibatan SATUNAMA dalam merumuskan agenda - agenda Pemberdayaan dan Penguatan

---

<sup>1</sup> Lebih lanjut, lihat Kusumahadi (tt), *Practical Challenges to the Community Empowerment Program Experiences of SATUNAMA Foundation of Yogyakarta, Indonesia*, tidak diterbitkan.

Masyarakat Sipil di Indonesia, yang antara lain dilakukan melalui pelatihan CEFIL.

Keberhasilan SATUNAMA melangsungkan pelatihan CEFIL secara berkesinambungan tidak lepas dari dukungan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman, narasumber, fasilitator, peserta, dan mitra-mitra NGO/CSO yang telah mengirimkan aktivisnya untuk mengikuti Pelatihan CEFIL.

## VARIASI MODEL PELATIHAN CEFIL

Program CEFIL mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek substansi materi, kurikulum, dan metodologi. Perubahan-



perubahan ini sebagai akibat logis dalam merespon konteks sosial-politik yang terus berubah dan memfasilitasi kebutuhan peserta CEFIL yang memiliki latarbelakang beragam.

Pada periode 1998-2008, pelatihan CEFIL berdurasi 30 hari dalam setiap kali pelatihan. Belakangan, setelah ada model-model lain yang lebih singkat, pelatihan model pertama ini biasa disebut dengan CEFIL Panjang.

Perubahan signifikan terjadi pada 2009 ketika SATUNAMA memutuskan (1) CEFIL tidak lagi dilaksanakan selama 30 hari penuh; (2) CEFIL dilaksanakan secara bertingkat, yaitu CEFIL Level I (Level Basic), CEFIL II (CEFIL Intermediate) dan CEFIL III (CEFIL Advance) – dikenal sebagai CEFIL Level; (3) CEFIL tidak hanya diselenggarakan di SATUNAMA, akan tetapi juga dilaksanakan di daerah-daerah di Indonesia. Karena itulah sejak 2009 CEFIL Level dilaksanakan di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Lampung; bukan lagi terpusat di Yogyakarta.

## CEFIL PANJANG

Selama 10 tahun pelatihan (1998-2008), SATUNAMA telah menghasilkan 22 angkatan CEFIL Panjang dengan 580 alumni pelatihan yang tersebar di berbagai organisasi masyarakat sipil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh, serta 19 orang alumni yang kini menjadi warga Timor Leste. Hal tersebut mencerminkan bahwa pelatihan CEFIL Panjang sangat diwarnai oleh interaksi beragam etnis, suku, agama dan kewilayahan. Demikian pula fokus kerja masing-masing organisasi peserta CEFIL sangat beragam. Tidak kalah penting dari itu, peserta CEFIL memiliki pengalaman yang berbeda-beda berdasarkan *locus* mereka masing-masing. Tidak bisa, misalnya saja pada kasus yang paling sederhana, menyamakan *locus* atau konteks Jawa dengan luar Jawa. Karena itu pula CEFIL Panjang mengalami beberapa kali perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan alumni.

# STUDI OBSERVASIONAL: REVIEW DAN REPOSISI

Setelah 15 tahun (1998-2013) sejak pertama kali CEFIL dilaksanakan, SATUNAMA melakukan Studi Observasional untuk melihat tipologi alumni CEFIL Panjang dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia, terutama mengenai kualitas ke-civic-an dan kapasitas politik alumni. Studi ini tidak dimaksudkan sebagai studi demi kepentingan akademis belaka, melainkan sebagai basis untuk merumuskan agenda - agenda pengembangan demokrasi.

Studi observasional Tipologi Alumni CEFIL Panjang ini bertujuan:

1. Mengetahui tipologi dan pilihan - pilihan arena alumni CEFIL;
2. Menelusuri dinamika dan identifikasi sosial, politik dan budaya alumni CEFIL;
3. Menganalisis konteks demokrasi masing-masing *locus* alumni CEFIL;
4. Menemukan “critical points” pengalaman Pelatihan CEFIL SATUNAMA dihubungkan dengan demokratisasi Indonesia selama 15 tahun demi untuk merancang Pendidikan Demokrasi berikutnya;
5. Menemukan basis sosial dan kultural bagi pengembangan demokrasi di Indonesia;

6. Memetakan basis sosial SATUNAMA di masing - masing *locus* alumni CEFIL untuk penguatan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal dan nasional;
7. Merekomendasikan agenda-agenda pengembangan demokrasi berbasis pada masing-masing *locus* alumni dan konteks Indonesia.

---

Kerangka ini secara khusus bermanfaat untuk menggali dan menganalisis sejumlah aspek kapasitas politik aktor

## FOKUS STUDI

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini fokus untuk menjawab pertanyaan berikut: *Bagaimana kondisi kualitas ke-civic-an dan kapasitas politik demokrasi alumni CEFIL dalam mengembangkan demokrasi di masing-masing locus mereka?* Pertanyaan tersebut diikuti oleh beberapa pertanyaan turunan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana tipologi alumni CEFIL? Arena-arena mana yang dipilih? Sumber daya-sumber daya apa saja yang digunakan? Bagaimana mereka memperoleh sumber daya tersebut? Dengan siapa alumni membangun kolaborasi dan kerjasama? Apa pengaruh CEFIL bagi alumni? Pengetahuan dan keterampilan mana yang diterapkan dan mana yang tidak? Adakah mereka berpindah dari satu arena ke arena yang lain atau tetap pada arena yang sama? Apa yang mendasarinya? *Kedua*, bagaimana konteks demokrasi dari masing-masing *locus* alumni? Apa pengaruh konteks terhadap pilihan-pilihan alumni? Bagaimana pula alumni memperbaharui konteks? Bagaimana mereka melakukannya?

## KERANGKA TEORITIK

Survey untuk mengetahui karakteristik alumni CEFIL ini menggunakan sebuah kerangka analitis yang ditawarkan oleh Törnquist et.al (2009). Kerangka ini secara khusus bermanfaat untuk menggali dan menganalisis

---

Dengan mengetahui  
kapasitas politik  
alumni CEFIL, kita  
dapat mencermati  
kekurangan dan  
kelebihan para aktor

sejumlah aspek kapasitas politik aktor, khususnya dalam mempengaruhi proses demokratisasi. Pilihan atas kerangka ini sesuai dengan maksud dilakukannya survey ini, yaitu sebagai sebuah studi pemetaan awal potensi alumni CEFIL sebagai agen-agen terdepan di dalam proses demokratisasi di wilayahnya masing-masing. Dengan mengetahui kapasitas politik alumni CEFIL, kita dapat mencermati kekurangan dan kelebihan para aktor, sehingga pada gilirannya hasil survey ini dapat menjadi basis penyusunan rekomendasi untuk para aktivis pendorong demokrasi.

Sebagaimana ditawarkan Törnquist et.al (2009), ada lima aspek kapasitas politik yang dilihat di dalam survey ini. Kelima aspek itu adalah (1) pilihan arena kegiatan, (2) sumber kekuasaan dan cara mentransformasikan sumber kekuasaan, (3) cara melakukan politisasi isu dan agenda, (4) cara melakukan mobilisasi dukungan publik, serta (5) pilihan-pilihan aliansi. Kelima aspek kapasitas politik ini terkait dengan lima kelompok teori penting mengenai bentuk-bentuk relasi-kuasa dan kapasitas politik untuk mempengaruhi proses demokratisasi.

Aspek pilihan arena kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa terinklusnya (atau tereksklusinya) para alumni CEFIL dalam proses-proses politik. Aspek ini secara fundamental akan memperlihatkan kepada kita seperti apakah situasi kesetaraan dan ketidaksetaraan berlangsung di dalam proses politik. Gambaran tentang pilihan arena kegiatan ini juga dapat memberikan informasi apakah para alumni



Pengembangan media sebagai alat komunikasi efektif civil society untuk mempengaruhi publik oleh Raymond Toruan (fasilitator).

CEFIL berada dalam posisi kesetaraan atautkah berada dalam posisi subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik lain di berbagai arena kegiatan. Lebih lanjut, gambaran yang diberikan oleh data ini adalah bagaimana proses marginalisasi berlangsung di dalam proses politik.

Aspek kedua menyangkut basis kekuatan yang dimiliki para alumni CEFIL dan bagaimana basis itu digunakan. Sebagai agen perubahan sosial, juga politik, alumni CEFIL harus memiliki kapasitas untuk mengubah basis-basis kekuatan yang dimilikinya menjadi kekuatan yang aktual dan memiliki pengaruh. Hal ini yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai *symbolic capital* dan kekuasaan politik.

Aspek ketiga adalah mengenai politisasi dan agenda setting. Pada bagian ini kita akan menelisik kapasitas alumni CEFIL untuk mengangkat persoalan hingga menjadi isu publik, untuk kemudian menjadikannya sebagai agenda politik. Hal ini misalnya terkait dengan wacana mengenai *public sphere* yang digagas Habermas (Seidman 1989), konsep hegemoni yang diperkenalkan Gramsci (Ransome 1992), dan konsep habitus sebagaimana dijelaskan Bourdieu (Bourdieu 1977). Lebih dari itu, melalui penajakan atas informasi ini kita akan memperoleh indikator-indikator penting yang berguna untuk menyusun *platform* dan agenda bersama (lihat Törnquist et.al. 2009 dan Törnquist 2009).

Aspek mobilisasi, tentu saja, perlu diketahui karena berbagai teori dasar tentang gerakan sosial memberikan perhatian khusus terhadapnya. Kita perlu, misalnya, membedakan cara-cara populisme-elitis dan klientelisme di satu sisi, dengan cara-cara berbasis organisasional di lain sisi. Selain itu ada pula cara mobilisasi dukungan melalui pembangunan jejaring, yang pada praktiknya bisa saja dikombinasikan baik dengan populisme atau organisasi. Seperti halnya aspek pilihan arena kegiatan, aspek mobilisasi ini juga memberikan manfaat kepada kita untuk mengetahui bagaimana proses inklusi (atau eksklusivitas) politik terjadi. Relasi antar-pihak, khususnya dalam konteks politik formal, juga dapat diketahui dari aspek mobilisasi ini.

Terakhir, aspek kapasitas menentukan pilihan aliansi akan memperkuat basis analisis tentang posisi para alumni CEFIL dalam menjalin relasi dengan pihak lain, dalam hubungan mereka melakukan perubahan-perubahan sosial dan politik.

Pengetahuan yang diperoleh mengenai kelima aspek kapasitas politik itu kemudian akan membantu kita mengetahui berbagai karakter alumni berdasarkan kapasitas politiknya. Berdasarkan karakteristik kapasitas politik yang berbeda-beda itulah kita dapat memikirkan dan mendiskusikan distribusi peran yang berbeda-beda untuk setiap kelompok karakter kapasitas politik alumni CEFIL.

## RANCANGAN STUDI

Lebih 15 tahun Reformasi Indonesia telah terlewati. Beragam institusi demokrasi dibangun dengan harapan dapat mematangkan dan mengembangkan demokrasi. Kebebasan pres, pemilu, tumbuhnya CSO dan partai politik dengan ragam ideologi dan model kepemimpinan menandai demokrasi Indonesia. Namun demokrasi bukanlah melulu desain institusi. Demokrasi adalah sesuatu yang *'political'*, kontekstual, tidak sepi dari konflik dan perebutan atas makna dan kegunaannya. Siapapun bisa menggunakannya untuk kepentingan yang berbeda.

---

Taruhlah misalnya saja, alumni CEFIL adalah promotor dan pejuang demokrasi, tidak bisa diabaikan bahwa mereka berada dalam konteks tertentu baik mikro maupun makro

Demokrasi memiliki konteks di mana para promotor dan pejuang demokrasi harus menghitungnya sebagai sesuatu yang *given* dan inheren dalam setiap upaya mengembangkan demokrasi, jika tidak mau gagal.

Meminjam Bourdieu (lihat Jen Webb et.al. 2002) demokrasi berada di dalam *field* yang konkret dengan hukum dan aturannya sendiri. *Field* adalah medan tempur, sesuatu yang '*political*', bagi setiap promotor dan pejuang demokrasi. Setiap promotor dan pejuang demokrasi harus menghitung *field* jika mau memenangkan pertempuran dalam mengembangkan demokrasi. Taruhlah misalnya saja, alumni CEFIL adalah promotor dan pejuang demokrasi, tidak bisa diabaikan bahwa mereka berada dalam konteks tertentu baik mikro maupun makro. Di sini perlu diletakkan kapasitas demokrasi alumni CEFIL dan konteks yang melingkupinya. Bagaimana ketertundukan aktor (alumni CEFIL) berhadapan dengan konteks dan terbarukannya konteks oleh kerja-kerja demokrasi alumni CEFIL.

Studi ini menggunakan metode Survey dengan mewawancara langsung alumni CEFIL dengan menggunakan kuesioner. Rancangan kuesioner disusun berdasarkan rancangan isi studi observasi tipologi alumni CEFIL.



*Pertama*, potret tipologi alumni. Bagian ini mendeskripsikan aktivitas alumni dan organisasi di mana mereka bergabung, berikut arena mana yang dipilih dan sumber daya apa yang digunakan. Bagian ini juga menggambarkan kapasitas alumni dalam politik demokrasi. Di bagian ini pula dideskripsikan bagaimana CEFIL ikut membentuk/berpengaruh terhadap alumni dan organisasi mereka dalam mengembangkan demokrasi dan kewargaan.

*Kedua*, *tracking* alumni. Bagian ini menelusuri perkembangan dan mobilitas alumni sejak mengikuti CEFIL hingga sekarang. Misalnya, apakah alumni masih di organisasi yang sama ketika mereka datang ke SATUNAMA atau sudah berpindah afiliasi organisasi. Apakah alumni berpindah dari satu arena ke arena yang lain, misalnya saja dari CSO ke negara (Parpol) atau bisnis atau dari CSO yang satu ke CSO yang lain. Demikian pula apakah alumni telah berpindah tempat, dari satu kota ke kota yang lain. Terutama kita ingin mengetahui, melalui bagian ini, apa yang melandasi dan melatarbelakangi alumni berpindah dari satu arena ke arena yang lain atau tetap setia pada arena lama (CSO) ketika mereka datang ke SATUNAMA, bagaimana pula mereka melakukannya.

*Ketiga*, konteks demokrasi. Bagian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan konteks bagi keberadaan alumni CEFIL sebagai aktor demokrasi di masing-masing *locus*. Meski demikian, bagian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji konteks demokrasi secara mendalam. Akan tetapi hanya dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran situasional alumni, kenapa yang satu begini dan yang lain begitu. Padahal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh CEFIL sama pada tiap angkatannya. Dengan kata lain, kapasitas yang sama dari masing-masing alumni belum tentu melahirkan hasil yang sama pula.

## TEMUAN

Survey ini pada awalnya dimaksudkan menysasar seluruh alumni CEFIL Panjang, mulai dari angkatan pertama (1998) hingga terakhir (2008). Berdasarkan *database*, jumlah keseluruhan alumni CEFIL Panjang sebanyak 580 orang, tersebar di 26 provinsi. Karena direncanakan sebagai sebuah sensus, sejak awal survey ini tidak didesain dengan skema sampling tertentu.

Pada pelaksanaannya, survey ini mengalami sejumlah kendala. Hingga akhir pelaksanaan pengumpulan data, terkumpul keterangan dari 199 alumni, atau sekitar 35 persen dari target sensus, yang ada di 60 kota/kabupaten di 16 provinsi. Proporsi terbesar adalah responden yang berada di DI Yogyakarta (23 persen), Jawa Timur (17 persen), Kalimantan Barat (13 persen) dan Jawa Tengah (10 persen). Meskipun survey ini tidak berhasil menjangkau seluruh wilayah tempat para alumni berada, setiap tahun pelatihan CEFIL terwakili secara relatif merata oleh responden yang terjaring.

(Lihat Tabel 1)

**Tabel 1.** Komposisi responden per provinsi

NO	PROVINSI	PERSEN
1	Banten	2%
2	DIY	23%
3	DKI	9%
4	Jabar	5%
5	Jateng	10%
6	Jatim	17%
7	Kalbar	13%
8	Kalteng	5%
9	Lampung	2%
10	Maluku	1%
11	NTB	1%
12	NTT	4%
13	Papua dan Papua Barat	1%
14	Sulsel	7%
15	Sulteng	2%
16	Sumut	1%
	Total	100.0

## PERIMBANGAN GENDER

Dari komposisi gender, alumni laki-laki yang menjadi responden survey ini jumlahnya sekitar dua kali lipat dibanding jumlah responden perempuan (65 persen berbanding 35 persen). Kelompok terbesar responden adalah laki-laki berusia antara 34-44 tahun (36 persen). Kebanyakan responden perempuan berusia 39-48 tahun (59 persen dari 69 responden perempuan), sedangkan di kelompok laki-laki kebanyakan berusia antara 34-44 tahun (56 persen dari 130 responden laki-laki). Artinya, secara umum alumni perempuan cenderung berusia lebih tua daripada alumni laki-laki. (Lihat Tabel 2)

**Tabel 2.** Komposisi responden menurut gender dan usia

NO	KELOMPOK USIA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI	
1	49 tahun atau lebih tua	3%	7%	10%
2	45 - 48 tahun	9%	12%	21%
3	39 - 44 tahun	12%	18%	30%
4	34 - 38 tahun	8%	18%	26%
5	29 - 33 tahun	2%	7%	9%
6	Tidakdiketahui	2%	4%	6%
	Total	35%	65%	100%

## AKTIVITAS FAVORIT: MENJADI AKTIVIS OMS

Aktivitas utama alumni CEFIL saat ini pada umumnya adalah sebagai aktivis di organisasi-organisasi masyarakat sipil (54 persen). Sebagian lainnya mengaku menjalankan bisnis (25 persen), dan hanya sedikit yang bekerja di sektor Negara (9 persen). Sekitar separuh dari seluruh responden mengaku memiliki kegiatan sekunder, namun lagi-lagi kebanyakan di antaranya adalah di lembaga-lembaga masyarakat sipil. (Lihat Tabel 3)

**Tabel 3.** Jenis lembaga tempat alumni bekerja saat ini

NO	JENIS LEMBAGA	LEMBAGA UTAMA	LEMBAGA SEKUNDER
		PERSEN	PERSEN
1	Negara	9	2
2	Bisnis	25	6
3	Masyarakat sipil	54	45
4	Tidak menjawab	12	48
Total		100	100



Diskusi kelompok untuk bertukar pengalaman dan teknik pengorganisasian masyarakat.

## MANFAAT DAN LIMITASI PELATIHAN CEFIL

Hampir seluruh responden memberikan komentar mereka tentang manfaat pelatihan CEFIL. Dari komentar yang terhimpun, manfaat pelatihan CEFIL dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu; (1) peningkatan kapasitas organisasional; (2) pengembangan keterampilan analisis; (3) perluasan pengetahuan dan wacana; (4) peningkatan kapasitas politik; (5) pengembangan jejaring, dan; (6) penguasaan keterampilan melakukan resolusi konflik. Kebanyakan alumni menyatakan bahwa pelatihan CEFIL terutama bermanfaat dalam hal perluasan pengetahuan dan wacana serta peningkatan kapasitas organisasional. Ilustrasi lebih detil mengenai hal-hal yang dapat mereka rasakan sebagai manfaat adalah pengembangan pengetahuan dan pengalaman serta peningkatan kapasitas diri, munculnya kesadaran-kesadaran baru untuk merespon perkembangan situasi politik, pengembangan kepemimpinan dan manajemen organisasi, kemampuan menyusun perencanaan dan mengimplementasikan program, melakukan monitoring dan evaluasi, serta membuat laporan.

Cukup banyak pula komentar para alumni yang menyatakan pelatihan CEFIL memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas individual untuk melakukan analisis sosial. Bagi sebagian alumni, manfaat ini bahkan dirasakan sangat besar dan relevan dengan kegiatan-kegiatan mereka, sehingga mereka berharap porsi pelatihan menyangkut analisis sosial dapat lebih diperbesar dan diperdalam.

Tak kalah penting dari itu, pelatihan CEFIL juga dinilai memberikan manfaat bagi upaya pengembangan jaringan. Meskipun komentar-komentar dari para alumni mengenai hal ini tidaklah sebanyak dibanding kategori manfaat lainnya, secara kualitatif pernyataan ini dapat dipahami sebagai indikasi bahwa kegiatan pengembangan kepemimpinan demokratis bukanlah aktivitas yang dapat dilakukan secara eksklusif, tetapi justru membutuhkan dukungan dari jejaring yang kuat dan terkonsolidasi. Jika dikaitkan dengan kategori manfaat yang ketiga, yaitu pengayaan

pengetahuan dan saling berbagi pengalaman, kebutuhan terhadap jejaring justru dapat dilihat sebagai kebutuhan yang tak terelakkan. Dalam konteks ini, pelatihan CEFIL dapat dilihat sebagai sebuah forum yang potensial dan penting bagi pembangunan dan pengembangan jaringan kerja bersama.

Di samping mengemukakan penilaian tentang manfaat, para alumni yang menjadi responden dalam survey ini juga menyampaikan sejumlah keterbatasan pelatihan CEFIL. Dari berbagai komentar yang dapat dihimpun, secara kategorial pernyataan-pernyataan para alumni mengenai keterbatasan pelatihan CEFIL dapat dibedakan menjadi tujuh persoalan substantif dan dua persoalan teknis pelaksanaan pelatihan. Ketujuh persoalan substantif itu adalah tentang: (1) Kepemimpinan dan pengembangan potensi diri; (2) Manajemen organisasi dan Fundraising; (3) Kekayaan isu, perspektif (misal, hukum dan gender) dan kedalaman materi; (4) Penanaman spritualitas, komitmen dan keterampilan teknis; (5) Eksplorasi lebih dalam tentang politik praktis dan strategi kampanye; (6) Keterampilan lobi, negoisasi, dan pengorganisasian, serta; (7) Maintaining alumni dan jaringan. Di luar itu, sebagian alumni menyoroti aspek teknis penyelenggaraan pelatihan yaitu mengenai (8) keterbatasan inovasi metode pelatihan serta (9) distribusi waktu untuk setiap materi pelatihan.

Keterbatasan pelatihan CEFIL terletak pada terlalu sedikitnya porsi yang tersedia bagi pendalaman materi untuk mengaitkan penjelasan-penjelasan teoretis dengan praktik lapangan

---





Diskusi tentang konflik dan pelanggaran hak asasi manusia bersama Ildal Kasim (komisioner KOMNAS HAM).

Dari berbagai persoalan yang disebutkan di atas, persoalan yang paling banyak disoroti alumni adalah mengenai keterbatasan pengayaan isu, perspektif dan kedalaman materi. Secara umum, keterbatasan pelatihan CEFIL terletak pada terlalu sedikitnya porsi yang tersedia bagi pendalaman materi untuk mengaitkan penjelasan-penjelasan teoretis dengan praktik lapangan. Menyangkut masalah ini, sebagian alumni mengaku mengalami kesulitan ketika harus mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh menjadi kegiatan nyata di lapangan, misalnya dalam hal melakukan komunikasi dengan masyarakat dan mengorganisasikan mereka. Itu sebabnya sebagian alumni mengharapkan sesi *live-in* yang cukup panjang dalam proses pelatihan.

Hal lain yang juga cukup banyak dianggap kurang adalah pembekalan di bidang manajemen organisasi khususnya tentang fundraising. Para alumni yang mengeluhkan masalah ini memberikan contoh bahwa tidak adanya cukup kesempatan yang diberikan kepada para peserta pelatihan untuk menjalin komunikasi dengan *funding agencies* yang potensial memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi para alumni.

Hal ini tampaknya menjadi kebutuhan serius yang perlu diperhatikan di masa mendatang, karena hasil-hasil pelatihan CEFIL bisa jadi tidak termanfaatkan karena masalah keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh organisasi para alumni. Setidaknya, dari komentar-komentar yang terhimpun, pelatihan CEFIL seharusnya menyediakan alokasi waktu dan perhatian yang cukup terhadap potensi para alumni dan organisasinya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan mereka dalam rangka mengimplementasikan materi-materi yang diperoleh dari pelatihan.

Yang menarik, terkait dengan potensi besar yang tumbuh seiring dengan banyaknya alumni pelatihan CEFIL selama ini, para alumni menyoroti kurangnya *follow-up* program setelah pelaksanaan pelatihan. Mereka memiliki harapan agar alumni CEFIL tetap dapat saling berhubungan dan bekerja secara berjejaring. Oleh karena itu, pelatihan CEFIL seharusnya tidak berhenti hanya pada proses pelaksanaan pelatihan, melainkan memiliki desain utuh yang menghubungkan proses pelatihan dan kegiatan pasca-pelatihan. Secara singkat, para alumni mengharapkan pelatihan CEFIL adalah sebuah fase saja dari serangkaian kegiatan yang diikat oleh visi jangka panjang. Tabel 4 berikut ini memperlihatkan manfaat dan keterbatasan pelatihan CEFIL menurut para alumni.

**Tabel 4.** Manfaat dan Limitasi Pelatihan CEFIL (Panjang) menurut responden

NO	MANFAAT		LIMITASI	
<b>SUBSTANSI PELATIHAN</b>				
<b>A. Organizational capacity building</b>				
1	Kepemimpinan dan pengembangan potensi diri	11%	Kepemimpinan dan pengembangan potensi diri	8%
2	Managemen organisasi dan Fundraising	14%	Managemen organisasi dan Fundraising	14%

NO	MANFAAT	LIMITASI		
<b>B. Analytical skill</b>				
3	Ketrampilan melakukan Ansos	20%		
<b>C. Sharing discourse and knowledge</b>				
4	Pengembangan pengetahuan dan kapasitas diri (termasuk pengalaman & fasilitasi)	19%	Kekayaan isu, perspektif (misal, hukum dan gender) dan kedalaman materi	37%
5	Kesadaran baru	10%	Penanaman spritualitas, komitmen dan keterampilan teknis	6%
<b>D. Political Capacity</b>				
6	Political skill (Pengorganisasian, mobilisasi, lobby, dan negoisasi)	8%	Eksplorasi lebih dalam tentang politik praktis dan strategi kampanye	3%
7	Keterampilan berkomunikasi	4%	Keterampilan Loby, Negoisasi, dan pengorganisasian	9%
<b>E. Networking</b>				
8	Pengembangan jaringan (termasuk peningkatan karir)	10%	Maintaining alumni dan jaringan	9%
<b>F. Lain-lain</b>				
9	Pengelolaan dan Resolusi Konflik	4%		
			<b>PELAKSANAAN PELATIHAN</b>	
			Inovasi metode pelatihan	1%
			Implementasi pelatihan (Waktu Ansos/prak	13%

## PENGARUH CEFIL TERHADAP AKTIVITAS ALUMNI

Sesungguhnya sulit untuk mengungkap bagaimana CEFIL telah mempengaruhi aktivitas para alumninya pasca-pelatihan. SATUNAMA sendiri sejauh ini belum memiliki program pemantauan dan pembinaan jejaring alumni. Selain itu para alumni CEFIL juga tentu mengikuti berbagai pelatihan selain CEFIL dan menjalani pengalaman yang berbeda-beda. Dengan demikian, CEFIL tentu saja bukanlah satu-satunya pelatihan yang menentukan perkembangan kapasitas, stagnasi, ataupun kemunduran kapasitas para alumni setelah pelatihan CEFIL.

Studi ini mencoba menggali informasi dari para alumni CEFIL mengenai momentum-momentum terpenting yang menandai perjalanan aktivitas setiap alumni setelah mereka mengikuti pelatihan CEFIL. Informasi tersebut berguna untuk melihat gambaran mengenai kecenderungan pilihan aktivitas para alumni dalam pengembangan dirinya. Pengetahuan mengenai hal ini penting agar SATUNAMA dapat merancang program-program pengembangan jejaring alumni yang sesuai dengan pilihan kecenderungan yang ada.

Data yang terkumpul dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kecenderungan pilihan aktivitas pada kurun periode tertentu. Kedua, pergeseran kecenderungan pilihan tertentu pada rentang periode yang berbeda. Tabel 5 memperlihatkan kedua sisi itu.

Secara umum, para alumni CEFIL kebanyakan mengarah perkembangannya menjadi aktivis NGO tingkat nasional. Kecenderungan ini diperlihatkan oleh 44 persen alumni. Menariknya, kecenderungan untuk menjadi aktivis NGO tingkat nasional ini mengalami kemerosotan cukup tajam pada periode 2009-2013.

**Tabel 5.** Momentum-Momentum Terpenting bagi Alumni Pasca-Pelatihan CEFIL

No	Milestones	1998-2003		2004-2008		2009-2013		Kecenderungan umum	
		% vertikal	% horizontal	% vertikal	% horizontal	% vertikal	% horizontal	% vertikal	% horizontal
1	Aktif di NGO nasional	59%	41%	39%	50%	28%	9%	44%	100%
2	Beralih ke dunia pendidikan	4%	33%	4%	67%	0%	0%	3%	100%
3	Beralih ke lembaga riset; Melakukan riset	0%	0%	1%	50%	4%	50%	1%	100%
4	Menjadi anggota/pengurus ormas/orsos	11%	23%	17%	65%	12%	12%	15%	100%
5	Menjadi jurnalis/Bekerja di media	0%	0%	5%	63%	12%	38%	4%	100%
6	Aktif menjalankan kegiatan politik/Masuk partai	2%	17%	3%	50%	8%	33%	3%	100%
7	Aktif di NGO internasional	7%	50%	4%	50%	0%	0%	4%	100%
8	Aktif di NGO berjejaring	9%	36%	7%	50%	8%	14%	8%	100%

No	Milestones	1998-2003		2004-2008		2009-2013		Kecenderungan umum	
		%	%	%	%	%	%	%	%
		vertikal	horizontal	vertikal	horizontal	vertikal	horizontal	vertikal	horizontal
9	Beralih ke organisasi agama	0%	0%	2%	67%	4%	33%	2%	100%
10	Menjadi profesional yang independen	2%	8%	7%	58%	16%	33%	7%	100%
11	Mengeluti/ Mengembangkan bisnis mandiri	2%	20%	3%	60%	4%	20%	3%	100%
12	Masuk ke arena negara/ Pemerintahan	4%	20%	7%	70%	4%	10%	6%	100%
	TOTAL	100%	30%	100%	56%	100%	14%	100%	100%

---

Di samping konsistensi, tampaknya para alumni juga memiliki pandangan bahwa menjadi aktivis NGO adalah “karir” yang juga memiliki tingkatan-tingkatan perkembangan

Kendati tetap menjadi pilihan kecenderungan paling utama dibandingkan aktivitas lainnya, pada kurun waktu 2009-2013 proporsinya hanya 9 persen dibandingkan pada kedua periode sebelumnya. Dapat ditambahkan di sini bahwa pilihan untuk menjadi aktivis NGO nasional mencapai puncaknya pada periode 2003-2008.

Data pada Tabel 5 juga memperlihatkan bahwa periode 2009-2013 adalah periode paling “sepi” dari tonggak penting dalam perjalanan aktivitas para alumni. Periode terpenting yang ditandai dengan banyaknya pencapaian momentum-momentum utama dalam perjalanan aktivitas para alumni adalah periode 2004-2008. Sebanyak 56 persen momentum utama dicapai para alumni pada periode ini.

Gejala lain yang juga perlu diperhatikan adalah adanya kecenderungan kuat para alumni untuk konsisten bergelut di dunia NGO. Di samping mengarahkan aktivitas menuju NGO tingkat nasional, sebagian alumni mengarahkan pilihan mereka menjadi aktivis NGO tingkat internasional maupun NGO berjejaring. Di samping konsistensi, tampaknya para alumni juga memiliki pandangan bahwa menjadi aktivis NGO adalah “karir” yang juga memiliki tingkatan-tingkatan perkembangan.

Selain itu, dari data yang ada terlihat pula betapa rendahnya kecenderungan para alumni untuk mengarahkan aktivitas mereka ke kegiatan politik dan aktivitas lain yang berhubungan dengan arena Negara. Pada periode 1998-2003, kiprah ini hanya mengisi 6 persen (2 persen masuk ke partai dan 4 persen masuk ke pemerintahan) dari seluruh momentum penting yang dijalani para alumni.



Angkanya meningkat sedikit menjadi 10 persen (3 dan 7 persen) pada periode 2004-2009 dan 12 persen (8 dan 4 persen) pada periode berikutnya. Jika dirata-rata, kecenderungan untuk masuk ke partai dan pemerintahan bahkan hanya 9 persen.

Memang, kecenderungan aktif ke wilayah politik dan pemerintahan sempat mengalami peningkatan tajam pada periode 2004-2009, akan tetapi pada periode berikutnya kecenderungan ini kembali mengalami kemerosotan.

Apa yang dapat disimpulkan dari sini adalah bahwa para alumni CEFIL memang cenderung lebih memilih untuk “berkarir” di dunia tradisional mereka, yaitu selaku aktivis NGO. Mereka praktis menjauhi arena Negara, sekalipun sesungguhnya struktur kesempatan politik telah membuka lebar bagi keterlibatan yang lebih intens di dunia politik dan pemerintahan. Di luar NGO, pilihan terpenting kedua adalah menggeluti aktivitas di organisasi masyarakat dan organisasi sosial.



Analisis aktor dan peran mereka dalam konflik yang terjadi di Indonesia.

## PILIHAN ARENA KEGIATAN: BERKERUMUN DI WILAYAH MASYARAKAT SIPIL

Secara umum, alumni CEFIL Panjang memilih aktif di unit-unit wilayah masyarakat sipil. Mereka terutama melakukan aktivitas di organisasi gerakan sosial, lembaga pendidikan dan institusi non-profit, serta organisasi sosial berbasis keagamaan, adat dan etnisitas. Aktivitas dan pengaruh mereka ke arena-arena di luar wilayah masyarakat sipil, apalagi di dunia bisnis, relatif terbatas. (Lihat Tabel 6)

**Tabel 6.** Kecenderungan umum pilihan arena kegiatan

ARENA DAN SUB-ARENA		PERSEN	
NEGARA	Parlemen dan lembaga representatif	6%	14%
	Birokrasi dan lembaga eksekutif	7%	
	Kemiliteran dan kepolisian	1%	
BISNIS	Bisnis skala besar	1%	7%
	Bisnis skala menengah	2%	
	Bisnis skala kecil	4%	
MASYARAKAT SIPIL	Organisasi keagamaan/etnis/adat	12%	60%
	Gerakan sosial	33%	
	Lembaga non-profit, koperasi, pendidikan	15%	
KOMBINASI	Kombinasi negara dan bisnis	0%	18%
	Kombinasi bisnis dan unit swadaya	3%	
	Kombinasi unit swadaya dan Negara	3%	
	Kombinasi negara dan masyarakat sipil	6%	
	Kombinasi masyarakat sipil dan bisnis	4%	
	Kombinasi masyarakat sipil dan unit swadaya	2%	
	Total	100%	

---

Data memperlihatkan bahwa intensitas aktivitas di organisasi gerakan sosial mengalami sedikit penurunan sejak 2005

Di samping kecenderungan umum untuk memilih arena aktivitas di unit-unit wilayah masyarakat sipil, tampak ada sedikit gejala pergeseran pilihan arena pada periode tertentu. Data memperlihatkan bahwa intensitas aktivitas di organisasi gerakan sosial mengalami sedikit penurunan sejak 2005 dan menurun lagi pada periode pasca-2009. Gejala serupa, intensitas yang sedikit menurun, juga terlihat pada organisasi sosial berbasis keagamaan/adat/etnisitas. Sebagai gantinya, ada indikasi ringan yang menandai kenaikan intensitas kegiatan para alumni di unit-unit birokrasi dan pemerintahan, serta unit-unit bisnis berskala kecil. Kenaikan ini juga dimulai pada 2005 dan berlanjut hingga pasca-2009. (Lihat Tabel 7)

**Tabel 7.** Kecenderungan pilihan arena kegiatan pada periode yang berbeda

NO	ARENA KEGIATAN	1998- 2004 Percent	2005- 2009 Percent	Pasca- 2009 Percent
1	Parlemen dan lembaga representatif	6%	7%	7%
2	Birokrasi dan lembaga eksekutif	5%	8%	8%
3	Kemiliteran dan kepolisian	1%	2%	0%
4	Bisnis skala besar	1%	1%	3%
5	Bisnis skala menengah	1%	2%	3%
6	Bisnis skala kecil	3%	3%	5%

NO	ARENA KEGIATAN	1998-	2005-	Pasca-
		2004	2009	2009
		Percent	Percent	Percent
7	Organisasi keagamaan/etnis/adat	15%	11%	10%
8	Gerakan sosial	37%	33%	28%
9	Lembaga non-profit, koperasi, pendidikan	15%	17%	15%
10	Kombinasi negara dan bisnis	0%	0%	0%
11	Kombinasi bisnis dan unit swadaya	1%	2%	4%
12	Kombinasi unit swadaya dan negara	3%	3%	3%
13	Kombinasi negara dan masyarakat sipil	6%	6%	7%
14	Kombinasi masyarakat sipil dan bisnis	3%	4%	4%
15	Kombinasi masyarakat sipil dan unit swadaya	2%	2%	2%
	Total	100%	100%	100%

Gejala pergeseran itu, betapapun sangat ringan, boleh jadi didorong oleh munculnya kecenderungan baru di kalangan aktivis gerakan sosial pada umumnya sejak 2005 untuk melakukan aksi *go politics*. Dalam kasus alumni CEFIL, kecenderungan *go politics* itu memang tidak serta-merta mengubah secara drastis orientasi pilihan arena kegiatan mereka dari wilayah masyarakat sipil ke wilayah negara. Akan tetapi, sebagian dari mereka tampaknya mulai menyadari bahwa pilihan arena kegiatan perlu di-diversifikasi, antara lain ke unit birokrasi dan pemerintahan serta arena dunia usaha. Meskipun begitu, gejala itu tetap saja terbilang sangat kecil. Hampir seluruh alumni CEFIL cenderung tetap konsisten secara sadar mengonsentrasikan aktivitas dan pengaruh mereka di wilayah masyarakat sipil.

## BASIS KEKUATAN DAN AKTUALISASINYA: DARI JARINGAN KE JARINGAN

Hampir seluruh alumni yang menjadi responden mengaku memiliki basis kekuatan berupa jejaring sosial. Selain menyandarkan diri pada basis kekuatan itu, para alumni cenderung mengombinasikan basis sosial mereka dengan mengakumulasi basis massa dan kultural. Sangat sedikit alumni yang mengombinasikan basis kekuatan jejaring sosialnya dengan upaya-upaya untuk melakukan akumulasi basis ekonomi.

Dengan gambaran basis yang seperti itu, wajar jika dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, para alumni cenderung memperlihatkan diri sebagai kekuatan sosial yang mengandalkan jejaring dan kegiatan-kegiatan diskursif. Fenomena ini mudah ditafsirkan sebagai penjelas bagi pilihan arena kegiatan, yang memang terkonsentrasi pada unit-unit arena di wilayah masyarakat sipil. Mereka tidak punya basis yang cukup guna mengembangkan kapasitas aktivitas mereka di wilayah Negara dan dunia bisnis.

Benar bahwa di antara pilihan-pilihan untuk mengaktualisasikan kekuatan, sebagian alumni CEFIL ada yang mencoba melakukan kontak dengan politisi dan anggota parlemen, misalnya, atau juga dengan pejabat pemerintahan dan birokrasi, akan tetapi kelihatannya mereka tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengembangkan potensi kekuatan jejaring mereka dalam melakukan kontak-kontak itu. Hal itu dicerminkan oleh temuan yang menyatakan bahwa kegiatan diskursif dan melakukan koordinasi dengan sesama aktivis gerakan sosial menjadi cara yang paling sering dilakukan untuk unjuk kekuatan mereka. Lebih dari itu, sangat kecilnya basis kekuatan ekonomi yang ada di kalangan alumni menjadikan pilihan-pilihan mereka untuk mengaktualisasikan kekuatannya di sektor-sektor ekonomi juga sangat terbatas. Mereka bahkan nyaris tidak pernah tampil sebagai kekuatan yang mendemonstrasikan kemandirian gerakan mereka.

Situasinya menjadi semakin tidak menggembirakan lagi ketika para alumni CEFIL pun jarang menyentuh sektor perubahan kebijakan. Padahal, secara umum para alumni CEFIL ada cukup banyak yang memiliki kombinasi basis kekuatan sosial dan kultural (pengetahuan, pendidikan). Dengan basis kultural yang cukup, seharusnya mereka dapat berperan untuk merumuskan alternatif-alternatif rumusan kebijakan terhadap para pembuat keputusan publik. Hal ini lagi-lagi menegaskan bahwa alumni CEFIL tidak cukup memiliki keyakinan untuk memperluas wilayah pengaruh mereka hingga ke wilayah negara. Tabel 8 di bawah ini meringkas gambaran tentang basis kekuatan para alumni.

**Tabel 8.** Basis kekuatan alumni CEFIL

NO	BASIS KEKUATAN	PERSEN
1	Ekonomi	8
2	Sosial	50
3	Budaya	19
4	Massa	23
Total		100

Sesungguhnya fenomena ini agak mencengangkan juga apabila disandingkan dengan data bahwa para alumni CEFIL memiliki kecenderungan pula untuk mengombinasikan basis kekuatan jejaring mereka dengan akumulasi basis kekuatan massa. Dengan kombinasi seperti itu, seharusnya kekuatan jejaring yang dibangun oleh para alumni dapat berkembang menjadi sebuah kekuatan penekan bagi proses-proses politik yang berlangsung di wilayah Negara, atau setidaknya menjadi bekal yang cukup untuk meluaskan pengaruh mereka ke wilayah Negara. Akan tetapi sebagaimana telah diperlihatkan pada bagian sebelumnya, para alumni CEFIL memiliki kecenderungan untuk tidak terlibat langsung dalam unit-unit yang ada di wilayah Negara. Gejala yang simpang siur ini, sayangnya, terjelaskan oleh sebuah data lain yang cukup menyolok, yaitu bahwa proses akumulasi kekuatan jejaring dilakukan secara terpisah dengan akumulasi kekuatan massa.

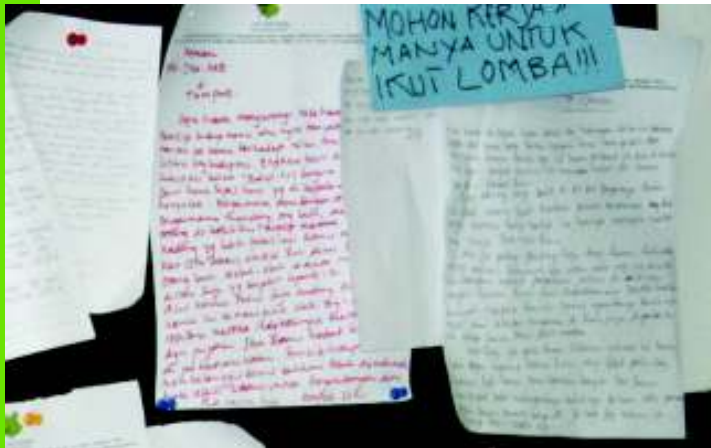
Dapat dikatakan bahwa jejaring aktivis gerakan sosial tidak serta-merta merupakan akumulasi kekuatan massa dari setiap anggota jaringan. Atau dengan kata lain, para alumni CEFIL sesungguhnya tidak memiliki basis massa yang riil.

Tabel 9 di bawah ini menggambarkan pilihan cara-cara transformasi atau aktualisasi basis-basis kekuatan. Di sana dapat dilihat bahwa cara-cara berbasis organisasi dan mencari mandat rakyat sangat sedikit digunakan pada saat mereka mentransformasikan basis-basis kekuatan yang mereka miliki. Hal ini akan semakin tegas lagi diperlihatkan oleh kecenderungan alumni CEFIL menyangkut aspek kapasitas politik berikutnya, yaitu kapasitas melakukan politisasi isu dan *agenda setting*.

**Tabel 9.** Pilihan cara transformasi basis kekuatan

NO	CARA TRANSFORMASI BASIS KEKUATAN	PERSEN
1	Kegiatan diskursif	23
2	Membangun jaringan dan koordinasi	18
3	Menggalang komitmen, keberanian, konsistensi	8
4	Kontak dan dialog dengan politisi dan pejabat pemerintahan	8
5	Memajukan solidaritas kelompok dan masyarakat	7
6	Kontak dan kerja sama dengan tokoh/ahli	7
7	Mendengarkan dan memetakan kebutuhan masyarakat	7
8	Memajukan kebijakan alternative	6
9	Membangun kepentingan bersama berbasis organisasi	5
10	Economic self-sufficiency	4
11	Mendemonstrasikan kekuatan kolektif	4
12	Membangun organisasi kewargaan demokratis	3
13	Lain-lain, termasuk mencari mandat rakyat	2

## POLITISASI ISU: MENGUNAKAN CARA-CARA NON-POLITIS!



Refleksi tentang perubahan dan impian peserta di akhir pelatihan CEFIL.

Isu dan kepentingan harus ditransformasikan menjadi agenda-agenda politik. Untuk melakukan itu diperlukan politisasi dan *agenda setting*. Cara melakukan politisasi dan pilihan mengemas isu menjadi faktor penting agar isu dan kepentingan dapat diwujudkan menjadi kebijakan-kebijakan publik yang mengikat.

Dalam kaitan dengan politisasi isu, alumni CEFIL tampaknya percaya benar dengan kekuatan masyarakat sipil. Sebagian terbesar aktivitas politisasi isu dilakukan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi sosial, di samping melakukan kegiatan diskursif dengan menulis di media massa, serta melakukan demonstrasi. Aktivitas-aktivitas lain yang langsung dikerjakan di wilayah Negara, yaitu dengan masuk ke partai politik dan lobi ke jajaran birokrasi, terbilang masih sangat terbatas. Artinya, para alumni CEFIL dengan sengaja menempatkan diri mereka sebagai kelompok penekan semata, dengan keyakinan adanya dukungan dari basis massa.



Padahal, sebagaimana diulas di atas, para alumni CEFIL sebagai bagian dari jejaring gerakan sosial sesungguhnya tidak memiliki basis massa yang riil. Apalagi, ada kecenderungan kuat bahwa isu-isu yang dikampanyekan oleh para alumni adalah isu-isu strategis yang sifatnya abstrak dan tidak secara langsung mengangkat kepentingan-kepentingan riil basis massa yang mereka wakili. Maka, cara-cara politisasi isu yang menjauhkan diri dari wilayah Negara hanya akan berbuah pada keramaian wacana di media massa, namun tidak senantiasa berhasil disusupkan menjadi agenda politik.

**Tabel 10.** Kecenderungan cara politisasi isu

NO	CARA POLITISASI	PERSEN
1	Aktif di organisasi sosial	35%
2	Menulis artikel di media massa	16%
3	Menulis di media social	15%
4	Demonstrasi, unjuk rasa	10%
5	Masuk birokrasi	7%
6	Memobilisasi dukungan politik	6%
7	Aktif di partai politik	5%
8	Membuat petisi	5%
9	Lain-lain	1%

## MOBILISASI DAN ALIANSI: LAGI-LAGI JEJARING

Permainan merupakan cara tepat untuk meneguhkan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antar individu dalam civil society organizations (CSOs)



Sejalan dengan kecenderungan pilihan cara politisasi dan transformasi basis kekuatan, alumni CEFIL tampaknya juga memiliki kecenderungan kuat untuk menggunakan jejaring sebagai pilihan utama melakukan mobilisasi dukungan. Di samping itu, mereka juga percaya bahwa dengan melakukan pengintegrasian organisasi, mobilisasi dukungan dapat membuahkan hasil. (Lihat Tabel 11)

**Tabel 11.** Kecenderungan pilihan cara mobilisasi dukungan

NO	CARA MOBILISASI DUKUNGAN	PERSEN
1	Membangun ketokohan kharismatik dan mera	16
2	Hubungan ketergantungan (patron client)	5
3	Membangun jaringan	40
4	Membangun organisasi baru	8
5	Mengintegrasikan berbagai organisasi	29
6	Lain-lain, termasuk menyebarkan gagasan lewat media, publikasi	3

Kedua cara ini sesungguhnya terbilang lebih “modern” dibandingkan cara-cara mobilisasi “tradisional” seperti membangun ketokohan kharismatik dan *patron-client relationship*. Dengan begitu, pilihan atas cara mobilisasi seperti itu memunculkan harapan akan adanya gerakan demokratisasi yang dimotori para alumni CEFIL. Namun, sayangnya, temuan-temuan pada aspek kapasitas politik lainnya, mulai dari pilihan arena kegiatan, basis kekuatan, cara transformasi basis kekuatan, dan politisasi isu, memperlihatkan kecenderungan kuat bahwa para alumni CEFIL seperti enggan memasuki wilayah-wilayah politik formal di level Negara. Artinya, cara mobilisasi yang relatif modern dan demokratis boleh jadi tidak cukup efektif dalam mendorong perubahan-perubahan kebijakan.

Dugaan itu menguat setelah kita melihat data lain tentang aspek kapasitas politik alumni CEFIL, yaitu soal pilihan membangun aliansi. Dalam aspek yang terakhir ini, lagi-lagi alumni CEFIL memperlihatkan kecenderungan kuat untuk membatasi lingkup pergaulannya hanya dengan aktor-aktor berbasis masyarakat sipil. Mereka seperti dengan sengaja menjauhkan diri untuk membangun aliansi dengan aktor-aktor yang berbasis di wilayah Negara, juga bisnis. (Lihat Tabel 12)

**Tabel 12.** Kecenderungan alumni CEFIL membangun aliansi

NO	PIHAK YANG DI AJAK BERALIANSI	PERCENT
1	Dengan aktivis gerakan sosial	44
2	Dengan tokoh masyarakat	34
3	Dengan politisi dan anggota DPRD	7
4	Dengan kepala daerah	4
5	Dengan pejabat birokrasi	7
6	Dengan kepolisian/kemiliteran	0
7	Lain-lain	3

## TIPOLOGI KAPASITAS POLITIK ALUMNI CEFIL PANJANG

Secara umum, alumni CEFIL Panjang cenderung sangat homogen jika dilihat dari berbagai aspek kapasitas politik yang mereka miliki. Mereka cenderung aktif di arena masyarakat sipil dan melakukan aktivitas-aktivitas berorientasi non-politis sebagai aktivis gerakan sosial. Kendati begitu, dengan mengesampingkan kecenderungan-kecenderungan umum itu, kita dapat membedakan karakter para alumni ke dalam empat kelompok seperti disajikan di dalam Tabel 13.

Pada awalnya, upaya membangun tipologi seperti ini dimaksudkan untuk mencari rekomendasi-rekomendasi spesifik berbasis karakter kapasitas politik. Akan tetapi, mengingat kadar homogenitas yang sangat tinggi, tipologi yang dihasilkan bukan merupakan pijakan yang baik guna meneruskan maksud awal. Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 13, sekalipun dapat dibedakan menjadi empat kelompok karakter, perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya tidak terlalu jelas benar.

Kesimpulan yang dapat kita bangun dari kenyataan ini adalah bahwa para alumni memiliki kekuatan yang nyaris merata. Mereka juga memberikan kesan kuat sebagai aktivis yang konsisten dengan pilihan-pilihan aktivitasnya.

Diskusi kelompok untuk memperkaya pemahaman tentang konflik yang terjadi di Indonesia.



**Tabel 13.** Tipologi alumni CEFIL (Panjang)

FAKTOR DIFERENSIASI	TIPE 1 SELF-HELP	TIPE 2 POLITIS, MULTI- AGENDA	TIPE 3 POLITIS, AGENDA- TERBATAS	TIPE 4 APOLITIS
Latar belakang	Berusia antara 34-48 tahun	Berusia 34 tahun ke atas	Berusia antara 39-48, terutama 44-48 tahun	Berusia antara 34-48 tahun
	Perempuan dan laki berimbang	Cenderung laki-laki	Cenderung laki-laki	Cenderung laki-laki
	Tahun pelatihan 2003 hingga 2006	Tahun pelatihan 2002 dan 2007	Tahun pelatihan 2000, 2005, 2007	Tahun pelatihan 1998, 1999, 2003
Arena kegiatan  Secara umum alumni CEFIL aktif di gerakan sosial dan LSM. Di luar arena itu, setiap tipe alumni memiliki arena kegiatan yang berbeda, terutama sejak 2005	Periode 1998-2004: Organisasi keagamaan/etnis/adat dan Lembaga non-profit, koperasi, pendidikan	Periode 1998-2004: Organisasi keagamaan/etnis/adat dan Lembaga non-profit, koperasi, pendidikan	Periode 1998-2004: Organisasi keagamaan/etnis/adat dan Lembaga non-profit, koperasi, pendidikan	Periode 1998-2004: Organisasi keagamaan/etnis/adat dan Lembaga non-profit, koperasi, pendidikan
	Periode 2005-2009 tetap	Periode 2005-2009: melebar ke parlemen dan birokrasi	Periode 2005-2009: melebar ke kombinasi Negara dan masyarakat sipil	Periode 2005-2009: menyempit ke lembaga non-profit, koperasi, pendidikan

FAKTOR DIFERENSIASI	TIPE 1 SELF-HELP	TIPE 2 POLITIS, MULTI- AGENDA	TIPE 3 POLITIS, AGENDA- TERBATAS	TIPE 4 APOLITIS
	Periode setelah 2009: melebar ke bisnis skala kecil	Periode setelah 2009: seperti periode sebelumnya	Periode setelah 2009: seperti periode sebelumnya	Periode setelah 2009: seperti periode sebelumnya
<p>Resources</p> <p>Pada umumnya alumni CEFIL memiliki source of power berupa jaringan. Di luar itu, ada perbedaan di antara setiap kelompok</p>	Memiliki resources ekonomi	Massa/pengikut	Budaya dan massa/pengikut	Budaya
Pilihan isu yang dipolitisasi	Isu strategis	Isu strategis	Isu tunggal	Isu strategis dan tunggal
<p>Cara politisasi isu</p> <p>Pada umumnya alumni CEFIL melakukan politisasi isu dengan memanfaatkan organisasi</p>	Menulis artikel di media massa dan demonstrasi	Menulis artikel di media massa, media sosial, dan demonstrasi, masuk birokrasi, mobilisasi dukungan politik	Aktif di partai, masuk birokrasi, menulis di media massa dan media social	Media massa, media social, petisi, birokrasi

FAKTOR DIFERENSIASI	TIPE 1 SELF-HELP	TIPE 2 POLITIS, MULTI- AGENDA	TIPE 3 POLITIS, AGENDA- TERBATAS	TIPE 4 APOLITIS
gerakan social tempat mereka bernaung/ berjejaring. Di luar itu, ada beberapa perbedaan di antara setiap kelompok				
<p>Cara mobilisasi dukungan</p> <p>Pada umumnya alumni CEFIL memobilisasi dukungan dengan memanfaatkan jaringan di antara sesama tokoh gerakan sosial. Di luar cara itu, ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat.</p>	Sangat bergantung pada jaringan antar-tokoh dan organisasi	Mengembangkan kepemimpinan kharismatik dan populis	Mengembangkan kepemimpinan kharismatik dan populis	Mengembangkan kepemimpinan kharismatik dan populis, serta membentuk organisasi baru
<p>Aliansi</p> <p>Pada umumnya alumni CEFIL membangun aliansi dengan sesama aktivis gerakan sosial. Di luar itu, ada perbedaan di setiap kategori kelompok</p>	Dengan tokoh masyarakat	Dengan tokoh masyarakat	Dengan tokoh masyarakat dan politisi	Dengan tokoh masyarakat dan birokrasi

## ARENA POLITIK LOKAL

Secara umum demokrasi Indonesia di tingkat lokal ternyata (masih) berwatak elitis. Gambaran atas berbagai temuan data memperlihatkan adanya beberapa jenis aktor dominan yang mendominasi gelanggang, dan memonopoli arena – khususnya dalam memanfaatkan seluruh sistem dan semua mekanisme dan prosedur. Demokratisasi lokal benar-benar membuka peluang bagi elite politik dan elite ekonomi untuk eksis, beraliansi, atau berkompetisi dalam memperoleh kekuasaan.

Dengan kata lain, membayangkan kalangan elite dominan itu berwatak anti-demokratik, jelas keliru.

Sebaliknya, mereka justru dengan lihai beradaptasi dengan demokrasi, tetapi pada saat yang sama juga memanfaatkan sepenuhnya sistem politik elektoral itu untuk kepentingan mengakumulasi kekuasaan dan sekaligus kekayaan. Sebagai sekedar ilustrasi awal, para aktor dominan itu menguasai partai-partai politik, masuk ke birokrasi, aktif di organisasi-organisasi sosial, dan terus menggalang dukungan politik.

Kenyataan yang sangat mencolok ini bisa dimengerti karena mereka sebenarnya muncul tanpa tandingan.



Di satu pihak mereka tidak menghadapi perlawanan dari kekuasaan feodal masa lalu (yang di Indonesia memang tidak pernah kuat), dan di pihak lain juga tidak mendapatkan oposisi yang cukup kuat dari kelas-kelas lain yang memiliki basis sosial dan organisasi yang solid (yang memang tidak ada). Kalangan elite dominan justru menjadi rekanan bagi bos-bos lokal yang memiliki basis massa primordial – etnis maupun agama. Dan, ini yang terpenting, kekuatan modal dari aktor-aktor bisnis menyusup sangat efektif dalam proses-proses politik persaingan kekuasaan. Kekuatan yang terakhir ini bisa merupakan aktor lokal yang sudah lama berkiprah sejak masa Orde Baru, atau aktor-aktor yang berasal dari pusat, atau bahkan mewakili kekuatan modal global.

Gambaran besar seperti ini memberikan kepada kita kesimpulan awal bahwa demokrasi lokal Indonesia, selain sangat elitis, sesungguhnya sekaligus juga berwatak oligarkis. Kesimpulan seperti itu sebenarnya telah banyak dibuktikan oleh hasil-hasil riset yang lain, meski dengan berbagai *angle* dan fokus yang berbeda (Demos 2004, 2007, 2009; Robison & Hadiz 2004; Klinken 2006; Cho 2008; Mietzner 2012; atau Winters 2013).

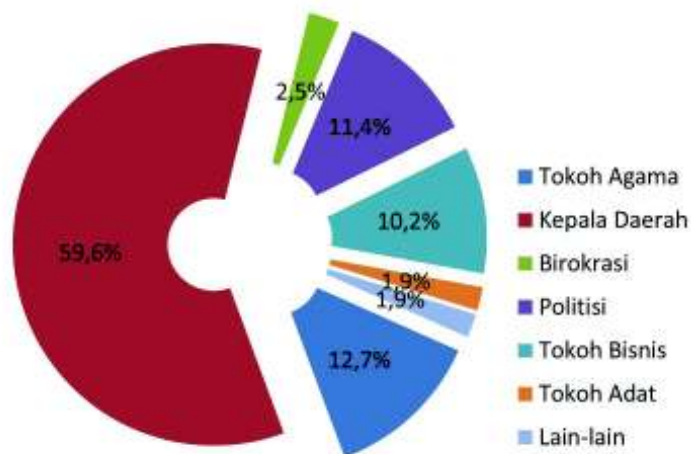


Peserta dari Flores sedang berbagi pengalaman tentang analisis, peta dan alur konflik yang terjadi di daerahnya.

## AKTOR DOMINAN: KOMPOSISI DAN ALIANSI

Observasi kami berhasil mengidentifikasi setidaknya enam jenis aktor dominan dalam proses-proses politik di tingkat lokal. Mereka adalah (1) kepala daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten; (2) tokoh agama; (3) politisi; (4) tokoh bisnis; (5) aktor-aktor birokrasi, baik sipil maupun militer; dan (6) para pemuka adat. Dari keenam aktor dominan itu, empat jenis aktor pertama adalah yang paling penting, yakni kepala daerah (60%), tokoh agama (13%), politisi (11%), dan tokoh bisnis (10%).

**Grafik 1.** Komposisi Aktor Dominan di Tingkat Lokal



Kepala daerah adalah aktor dominan yang paling penting, hampir di semua wilayah lokal Indonesia. Meskipun secara rata-rata posisi mereka mencapai sekitar 60% dalam keseluruhan komposisi aktor dominan lainnya, tetapi di beberapa daerah peranan dominatif mereka dirasakan oleh para informan jauh melebihi peranan aktor-aktor lain. Di DKI Jakarta, Banten, Kalbar, Papua dan Papua Barat misalnya, dominasi mereka dirasakan mutlak, yakni di atas 75%. Di DIY, Jateng, Jabar, dan Sulsel, peranan mereka juga berada di atas rata-rata kecenderungan

umum, yakni antara 61% hingga 73%. Meskipun demikian, di tempat lain, dominasi kepala daerah terlihat tidak lebih besar dibandingkan pengaruh tokoh-tokoh agama. Fenomena ini misalnya terlihat di Jatim (38% : 30%) dan Sulteng (40% : 20%).

**Tabel 14.** Komposisi Aktor Dominan di Beberapa Provinsi

	TOKOH AGAMA	KEPALA DAERAH	BIROKRASI (SIPIL/MILITER)	POLITISI	TOKOH BISNIS	TOKOH ADAT
BANTEN	13	75	0	0	0	13
DIY	2	65	2	24	3	0
DKI JAKARTA	3	90	3	0	3	0
JAWA BARAT	23	62	8	0	8	0
JAWA TENGAH	13	43	3	20	10	3
JAWA TIMUR	38	30	4	16	13	0
KALIMANTAN BARAT	2	80	0	2	14	2
KALIMANTAN TENGAH	0	60	0	15	20	5
LAMPUNG	0	60	0	20	20	0
NUSA TENGGARA TIMUR	50	17	8	0	8	8
PAPUA & PAPUA BARAT	0	75	0	0	0	25
SULAWESI SELATAN	0	73	5	0	23	0
SULAWESI TENGAH	40	20	0	20	20	0

<sup>2</sup> Sebuah catatan perlu dikemukakan di sini mengenai DKI-Jakarta. Ada 18 informan yang memberikan jawaban bahwa pengaruh dominan pejabat eksekutif pemerintahan Gubernur DKI – pasangan Jokowi-Ahok – sangat mutlak, yakni 90%. Jika kita menafsirkannya secara lazim seperti yang berlaku terhadap kepala-kepala daerah lain yang juga dominan, tentu ini mencuatkan tanda tanya besar mengenai bagaimana halnya dengan pengaruh aktor-aktor dominan lainnya seperti para politisi di DPRD, pengaruh mafia bisnis, dan dominasi pejabat-pejabat pemerintah pusat yang seringkali melakukan intervensi kebijakan Pemda DKI. Di sini sua kasus bisa jadi rujukan: empat jalan tol dalam kota, dan kebijakan mobnas. Benarkah demikian? Benarkah data itu menunjukkan bahwa pengaruh mereka dinafikan oleh dominannya pengaruh Jokowi-Ahok? Tentu tidak demikian. Lalu, apa interpretasi alternatifnya? Kami berpendapat bahwa dominasi pengaruh Jokowi-Ahok tampaknya mengindikasikan munculnya harapan akan munculnya figur kepala daerah yang mendapat dukungan besar pemilihnya, yakni agar mereka benar-benar berperan sebagai figur kepala daerah yang kuat. Kesimpulan alternatif ini tampaknya sejalan dengan hasil riset UGM-UiO (2014) yang memperlihatkan bahwa perkembangan demokratisasi Indonesia sekarang sedang berkembang ke arah terbentuknya politik berbasis-tokoh (*figure-based politics*).

Komposisi aktor dominan cukup menarik jika kita mempertimbangkan peranan aktor bisnis dan aktor politik. Variasinya terlihat melalui ilustrasi berikut. Di DIY pengaruh politisi melebihi pengaruh tokoh-tokoh agama (24% : 2%); begitu juga di Jateng (20% : 13%). Di Kalteng dan Lampung, pengaruh dominan politisi menempati urutan kedua setelah kepala daerah, karena pengaruh tokoh-tokoh agama nyaris tiada di kedua wilayah provinsi itu.

Sementara itu, dalam hal di mana pengaruh tokoh-tokoh politik dan agama tidak cukup kuat, maka aktor-aktor bisnis berada pada urutan kedua setelah kepala daerah. Ini muncul misalnya di Kalbar, Kalteng, dan Sulsel. Sedangkan di Lampung dan Sulteng, aktor bisnis dan politisi berada pada posisi kompetitif yang setara di bawah posisi dominatif kepala daerah. Aktor-aktor bisnis memiliki pengaruh pada urutan ketiga di wilayah-wilayah seperti NTT, Jabar, dan DIY.

Apa yang bisa disimpulkan dari data-data di atas? Keempat jenis aktor paling dominan, yakni kepala daerah, tokoh agama, politisi, dan aktor-aktor bisnis, sesungguhnya mewakili tiga kelompok blok kekuatan elite yang bersifat monopolis.

Ketiga blok itu, *pertama*, adalah kekuatan elite politik. Seperti terlihat dari data di atas, pemegang jabatan formal tertinggi eksekutif pemerintahan – yakni bupati, walikota, maupun gubernur – adalah yang paling mendominasi proses-proses kekuasaan politik lokal. Jika kita ingat bahwa jabatan eksekutif kepala daerah itu pada umumnya juga adalah tokoh-tokoh yang berasal dari partai-partai politik, maka kombinasi dari kedua jenis elite itulah yang memberikan warna terpenting dominasi. Mereka semua mewakili elite politik, memonopoli posisi-posisi formal kekuasaan politik di tingkat eksekutif, termasuk birokrasi, maupun partai-partai politik dan parlemen.

*Kedua* adalah jenis elite sosial, terutama dari kalangan tokoh berbasis komunitas lokal, baik agama maupun etnis (adat). Tokoh-tokoh jenis ini merepresentasikan kekuatan elite yang mengandalkan massa yang

besar – dalam beberapa kasus bahkan terdiri dari kelompok-kelompok *uncivil-society* – vis a vis kelompok *civil-society* yang berada di organisasi-organisasi sipil. Jadi jenis elite yang kedua ini adalah elite sosial dengan kecenderungannya untuk memonopoli kekuatan massa.

Kelompok *ketiga* adalah jenis elite ekonomi, terdiri dari aktor-aktor bisnis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun multi-nasional, yang cenderung melakukan monopoli atas sumber-sumber ekonomi. Kelompok terakhir ini, berbeda dengan kelompok pertama yang memonopoli sumber-sumber kekuasaan formal atau kelompok kedua yang memonopoli kekuatan massa, adalah pemegang sumber-sumber kekuasaan material.

Meskipun ketiga jenis kekuatan elite ini memiliki sumber kekuasaan yang berbeda, tetapi sebagai suatu kumpulan elite yang bersekutu, mereka adalah satu blok tunggal kekuasaan elitis dengan dukungan massa yang besar. Dalam konteks ini, kita bisa melihat dimensi lain demokrasi elitis (berbasis kekuasaan formal) yang bercorak oligarkis (berbasis pada kekuasaan material) di tingkat lokal, itu sesungguhnya adalah sekaligus demokrasi massa (berbasis pada para pemimpin massa).

Memang agak kedengaran kontradiktif bahwa demokrasi elitis-oligarkis bisa memiliki ciri juga sebagai demokrasi massa.

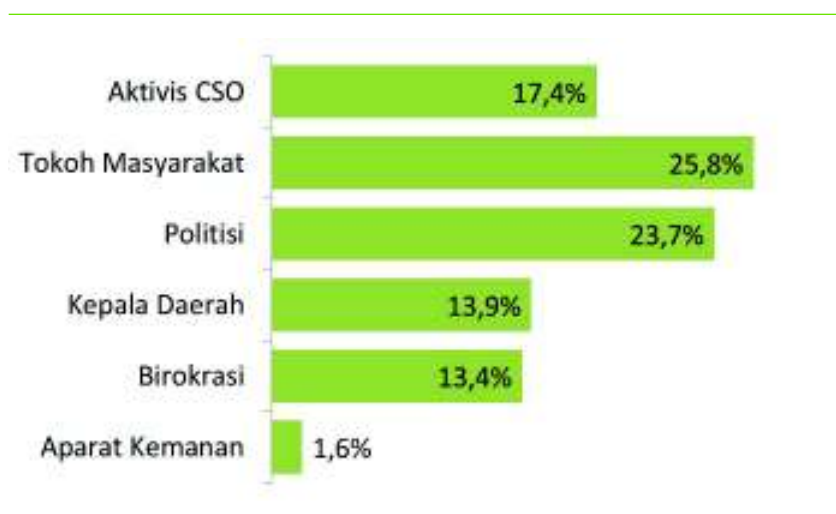


“Teater Rakyat” merupakan salah satu materi penggalian budaya setempat yang sangat membantu proses pengorganisasian komunitas.

Tetapi dalam konteks praktik politik hubungan-hubungan kekuasaan di tingkat lokal Indonesia dewasa ini, jelas bahwa massa lebih diperlakukan sebagai jumlah suara dukungan atas kelangsungan kekuasaan elitis, khususnya dalam proses-proses politik elektoral pemilu. Inilah yang membedakan demokrasi massa dengan demokrasi sipil yang basis dukungannya adalah komunitas-komunitas *civic* dan kelompok-kelompok kewarganegaraan sosial, ekonomi, politik (Andersen 1995, Beetham 1999), dan bukannya komunitas-komunitas primordial yang menjadi basis demokrasi massa.

Sekarang, mari kita lihat bagaimana sebagai sebuah blok kekuatan elitis-oligarkis, para aktor dominan itu menjalankan berbagai aliansi dengan kelompok-kelompok politik lainnya

**Grafik 2.** Aliansi-aliansi aktor dominan

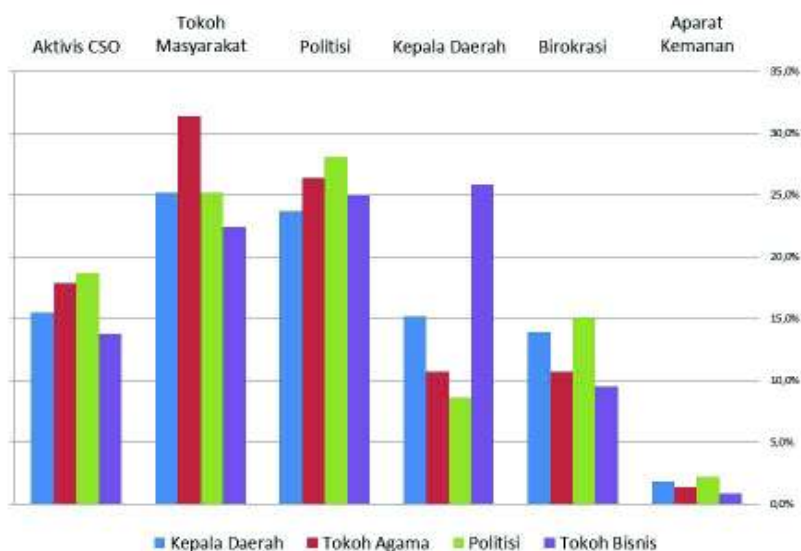


Grafik 2. menggambarkan bahwa preferensi tertinggi para aktor dominan untuk menjalin persekutuan, pertama-tama adalah dengan apa yang disebut “tokoh masyarakat.” Di sini bentuk aliansi yang terbangun adalah aliansi strategis karena elite politik dan elite ekonomi memerlukan dukungan tokoh masyarakat untuk tujuan-tujuan strategis dalam rangka mendapatkan dukungan politik jangka panjang.

Ini sejalan dengan logika demokrasi elektoral bahwa elite membutuhkan dukungan massa. Jika “tokoh masyarakat” itu diasumsikan memiliki sumberdaya kekuatan massa, maka elite politik maupun elite ekonomi tentu memerlukan mereka bukan saja untuk memperoleh dukungan suara dalam pemilu, tetapi juga untuk semacam perlindungan politik.

Logika semacam ini bisa dikonfirmasi dengan grafik 3. Aliansi para kepala daerah dengan kepala daerah, atau antara politisi dengan politisi, adalah persekutuan primer elite politik. Aktor-aktor bisnis sebagai elite ekonomi sudah merupakan bagian integral dari persekutuan tersebut, sebagaimana terbukti pada kenyataan bahwa dalam setiap aliansi primer itu sudah terkandung di dalamnya aktor-aktor bisnis. Dengan kata lain, aliansi elite politik dan elite ekonomi menjadi imperatif dasar untuk menyatukan kepentingan mereka sebagai sebuah blok elite borjuasi. Tetapi kekuasaan blok elite borjuis ini masih tetap memerlukan dukungan lebih luas agar bisa bertahan. Itu sebabnya mereka harus menemukan berbagai jenis dukungan lain.

**Grafik 3.** Aliansi Empat Jenis Aktor Dominan Paling Berpengaruh



Setelah menjalin aliansi strategis dengan para pemimpin massa melalui tokoh-tokoh masyarakat, mereka juga masih memerlukan dua jenis dukungan lain, yakni dari birokrasi dan aparat keamanan di satu pihak, dan dari aktivis organisasi masyarakat sipil di pihak lain. *Pertama*, dengan birokrasi dan aparat keamanan, aliansi yang mereka bangun jelas hanya bersifat instrumental sebagai perluasan monopoli atas instrumen-instrumen kekuasaan. Jika diperhatikan dari grafik 3, terlihat bahwa preferensi untuk menjalin jenis aliansi dengan dua aktor itu tidak terlalu tinggi karena praktis mereka sudah menjadi bagian dari struktur-struktur elitis-oligarkis di dalam pemerintahan. Militer dan polisi misalnya bukan lagi aktor penting yang perlu diprioritaskan karena fungsi mereka hanyalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban rezim. Mekanisme aliansi dengan mereka, seperti halnya dengan birokrasi, sepenuhnya bersifat internal untuk pelayanan kekuasaan.

*Kedua*, berbeda dengan itu, aliansi dengan aktivis-aktivis CSO memerlukan pendekatan lain. Mereka berada di luar rezim, kadang-kadang punya *bargaining position*, dan karena itu membutuhkan tawar-menawar politik yang sering alot. Selama ini taktik yang digunakan adalah mengeksklusi mereka, melakukan penyusupan ke dalam untuk pencaplokan, atau dengan cara lain yakni mengokupasi. Dengan cara terakhir ini maka jenis aliansi yang terbangun menjadi lebih sering bersifat okupasionis.

Upaya menemukan hikmah atau makna dalam setiap peristiwa harian merupakan kegiatan yang dilakukan di akhir sesi setiap hari dalam CEFIL.

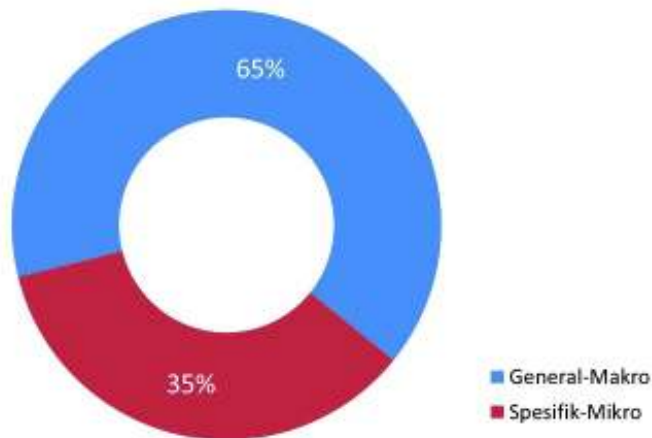




## POLITISASI DAN MOBILISASI BERBASIS AGENDA

Tindakan-tindakan aliansi politik jelas memerlukan *agenda setting* agar mendatangkan hasil dalam bentuk dukungan politik yang terukur. Bagaimana cara aktor dominan membangun *agenda* mereka untuk melakukan politisasi isu dan mobilisasi dukungan? Data berikut menjelaskan sesuatu yang penting.

**Grafik 4.** Agenda-Setting Aktor Dominan



Grafik 4. secara mencolok menjelaskan bahwa sebagian besar aktor dominan (65%) memang mempunyai agenda yang bersifat general dan makro mengenai banyak isu yang akan ditangani. Hanya sedikit (35%) yang menyusun agenda spesifik dan mikro. Dalam situasi di mana partai-partai makin kehilangan inspirasi idelogisnya, kecenderungan pada isu-isu general dan makro itu sebenarnya justru menandakan kekaburan tujuan mengenai apa yang ingin mereka capai dalam pekerjaan politik.

Juga dalam situasi di mana para calon politisi saling berebut menguber jabatan-jabatan politik dengan semangat memburu “pekerjaan-basah,” maka mereka memang bisa mengalami distorsi sejak dari niatnya. Mereka juga tidak memiliki orientasi yang jelas mengapa mereka *go politics!*

Sementara itu, grafik 5 memberikan gambaran masing-masing tentang tiga cara utama politisasi dan mobilisasi yang umumnya ditempuh oleh aktor-aktor dominan. Dua mode politisasi dan mobilisasi utama ini sebenarnya merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yang akhirnya membentuk kecenderungan umum bagi munculnya karakter politik aktor dominan secara keseluruhan seperti sudah dijelaskan di atas.

**Grafik 5.** Mode Politisasi dan Mobilisasi Aktor Dominan



Masuk dan aktif di partai-partai politik adalah cara umum paling banyak yang dipilih oleh aktor dominan untuk berkiprah dalam politik. Tak peduli apa ideologinya atau di mana basis sosialnya, rata-rata aktor dominan hanya mempertimbangkan partai-partai yang paling memungkinkan mereka lolos kompetisi dan kontestasi politik melalui sistem elektoral.

Menggunakan partai-partai politik, mereka merintis kekuasaan. Inilah jalan menuju karir sebagai elite politik yang ditempuh aktor dominan. Itu modal utama mereka untuk menjaring pengaruh politik berikutnya. Sebagaimana terlihat dalam pembahasan pada sub-bab sebelumnya, para politisi partai dan kepala-kepala daerah adalah aktor-aktor yang menjadi rekanan para aktor bisnis yang juga ingin masuk politik. Dengan memanfaatkan partai-partai politik, ketiga jenis aktor ini akhirnya berada di pusat permainan politik utama dan menjalankan agenda-agenda mereka melalui proses-proses politik formal.

Tetapi ternyata bukan hanya melalui partai-parai politik itu saja mereka membangun kekuatan dan pengaruh politik. Cara lain yang juga lazim ditempuh adalah dengan aktif atau terlibat di organisasi-organisasi sosial, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Ini ditempuh sebagai bagian dari strategi penggalangan dukungan. Persis seperti dalam praktik aliansi yang sudah digambarkan di bagian atas, penggalangan dukungan juga dijalankan dengan berbagai modus.

Praktik-praktik mobilisasi dukungan juga dijalankan oleh para aktor dominan dengan berbagai cara. Cara paling populer dan lazim dipilih adalah membangun karisma ketokohan, membangun jaringan organisasi, dan membangun patronase. Adalah menarik untuk dicermati lebih jauh bahwa membangun karisma adalah pilihan yang dianggap paling mujarab, lebih ketimbang misalnya merumuskan program untuk menarik perhatian. Tampaknya para aktor dominan ini merasa bahwa pesona individual jauh lebih berpotensi menarik simpati ketimbang komitmen untuk janji pelaksanaan program. Inilah mungkin yang menjelaskan fenomena “politik pencitraan” yang sejauh ini memang masih banyak dipraktikkan para politisi. Gejala ini sebenarnya bisa dipahami karena para politisi masih membayangkan konstituennya hanya sekadar massa “fans” yang mudah dibuai simulakra. Tetapi sekarang ini, di tengah-tengah suasana *public-distrust* yang meluas terhadap politisi, kegemaran untuk terus bermain-citra justru memperlihatkan ketidakpekaan aktor dominan terhadap sentimen publik yang negatif terhadap mereka.

Mobilisasi dukungan dengan cara membangun jaringan organisasi menjadi pilihan favorit kedua oleh para aktor dominan. Akan keliru untuk membayangkan bahwa yang dimaksud di sini adalah membangun relasi organik antara organisasi-organisasi sosial dan partai-partai untuk koalisi politik secara horisontal dan setara – atau dalam pengertian yang luas untuk membangun kembali *missing-link* yang terputus antara *civil-society* dan *political-society*. Pada kenyataannya upaya itu hanya dikerjakan sebatas untuk konsolidasi organisasi-organisasi yang berada di bawah kendali partai atau milik partai. Jadi, di sini, alih-alih membentuk koalisi permanen untuk perluasan dukungan dari organisasi-organisasi sosial, para aktor dominan itu lebih menjalankan praktik korporatis-monopolistis yang dijalankan secara *top-down*.

Kecenderungan korporatisasi ini pula mendapatkan pembenarannya pada praktik patronase yang dijalankan para aktor dominan. Dengan menjalankan praktik patronase, para aktor dominan itu memang cenderung menempatkan diri pada posisi di atas para konstituennya – bahkan publik pada umumnya – sebagai sumber dari segala pengetahuan, kekuasaan, dan kekayaan.

Alih-alih membentuk koalisi permanen untuk perluasan dukungan dari organisasi-organisasi sosial, para aktor dominan itu lebih menjalankan praktik korporatis-monopolistis yang dijalankan secara *top-down*.

---

## SUMBER KEKUASAAN AKTOR DOMINAN

Akhirnya mari kita analisis data terakhir mengenai sumber kekuasaan aktor dominan. Sejalan dengan prioritas untuk menjalin aliansi strategis dengan elite-elite sosial, para aktor dominan berhasil menggaet sumber kekuasaan sosial berupa massa yang besar (26,5%) dan jejaring sosial yang luas (32%). Ini melengkapi posisi monopolis mereka di wilayah sosial, setelah sebelumnya mereka memonopoli nexus kekuasaan politik dan ekonomi (25,7%). Dengan menggasak semua sumber kekuasaan ini, mereka jelas tidak lagi memerlukan sumber-sumber kekuasaan koersif melalui praktik-praktik polisionil maupun militeristik.

**Grafik 6.** Sumber Kekuasaan Aktor Dominan



Jadi, berbeda jauh sekali dengan basis kekuasaan yang dimiliki kalangan masyarakat sipil yang hanya mendasarkan diri pada wilayah diskursif (pengetahuan, budaya, komunitas akademik, kaum terpelajar), maka apa yang dimiliki oleh aktor dominan adalah hampir segala-galanya.

Penguasaan pada hampir seluruh sumber kekuasaan ini membuat para aktor dominan mencuat pada posisi mendominasi seluruh proses sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. Lagi-lagi, jika posisi aktor dominan ini dibandingkan dengan posisi para aktivis masyarakat sipil yang terus mengalami marginalisasi, menjadi sangat kelihatan bahwa mereka benar-benar tanpa tandingan.

Demikianlah, secara keseluruhan gambaran atas pemaparan data di atas memperlihatkan sebuah kesimpulan besar dan umum bahwa arena politik lokal – setidaknya di 16 provinsi tempat para alumni CEFIL melakukan aktivitas mereka – nyaris menjadi arena yang sudah terokupasi oleh kekuatan elite setempat. Persekutuan kaum elite politik, elite ekonomi, dan elite sosial menjelma menjadi sebuah blok kekuasaan elitis-oligarkis yang membajak demokrasi elektoral, dan pada saat yang sama mengkoloni hampir seluruh sumber kekuasaan. Struktur-struktur monopolis dalam wilayah politik, ekonomi, dan sosial terbangun melalui mekanisme demokrasi elektoral partokratik (berbasis partai), tetapi juga ditopang oleh praktik demokrasi massa yang berbasiskan pada komunitas-komunitas primordial. Struktur monopolis yang sama telah menciptakan relasi-relasi kekuasaan yang tidak seimbang, khususnya dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memiliki kapasitas politik dan sumber kekuasaan yang terbatas; dan karena itu terus berada pada posisi marginal.

Persekutuan kaum elite politik, elite ekonomi, dan elite sosial menjelma menjadi sebuah blok kekuasaan elitis-oligarkis yang membajak demokrasi elektoral

---

## KUALITAS KE-CIVIC-AN

---

Para alumni CEFIL cenderung mengedepankan sentimen mereka sebagai penduduk Indonesia dan penduduk kota/kabupaten mereka ketika berhadapan dengan situasi pemilihan demokratis

Aspek terakhir yang coba diketahui melalui studi ini adalah kualitas kewarganegaraan para alumni CEFIL. Kualitas kewarganegaraan yang dimaksud adalah seberapa kuat sentimen keanggotaan nasional, atau warga Negara, mempengaruhi pilihan-pilihan dan tindakan politik. Tentu saja hal ini selayaknya ditelusuri dengan upaya pengkajian serius yang khusus dilakukan untuk itu. Di dalam studi ini, aspek ini coba ditengarai dengan pertanyaan sederhana mengenai identitas apa sajakah yang paling dominan mempengaruhi pemikiran para alumni ketika menghadapi momentum-momentum politik nasional, seperti pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden. Di samping itu, studi ini juga mencoba melihat kepada siapa orang-orang mengadukan persoalan mereka, apakah kepada lembaga-lembaga publik demokratis ataukah kepada pihak-pihak lain.



## SENTIMEN KEWARGANEGARAAN

Para alumni CEFIL cenderung mengedepankan sentimen mereka sebagai penduduk Indonesia dan penduduk kota/kabupaten mereka ketika berhadapan dengan situasi pemilihan demokratis. Pengakuan ini dikemukakan oleh nyaris semua alumni yang menjadi responden di dalam studi ini (93 persen). Hal ini menandakan bahwa para alumni CEFIL merasa lebih terikat pada kepentingan umum lintas-kelompok ketimbang mengutamakan kepentingan-kepentingan kelompok berbasis suku, etnis, maupun agama. Sentimen-sentimen itu bahkan masih lebih rendah dibandingkan sentimen berbasis kelas sosial yang menempati posisi ketiga dari berbagai sentimen identitas yang ada.

Akan tetapi kualitas kewarganegaraan yang relatif menonjol itu ternyata tidak berlaku di kalangan orang kebanyakan alias publik. Para alumni CEFIL berpendapat bahwa, bagi orang-orang kebanyakan, sentimen-sentimen berbasis kelompok justru merupakan sentimen-sentimen terpenting. Pendapat itu memang boleh jadi menggambarkan situasi yang sebenarnya, dan karena itu tidak terlalu mengejutkan. Dalam banyak peristiwa dan tempat, sejumlah kasus politik memperlihatkan masih cukup kuatnya peran etnis dan agama dalam mempengaruhi proses-proses politik. Tabel 16 memperlihatkan keyakinan para alumni CEFIL bahwa identitas keagamaan dan etnisitas-lah yang paling mempengaruhi pikiran publik ketika menghadapi pemilihan umum yang demokratis (66 persen dan 53 persen).



**Tabel 15.** Alumni CEFIL mengidentifikasi diri

NO	IDENTITAS	PERSEN RESPONDEN
1	Penduduk Indonesia	93%
2	Penduduk kabupaten/kota/provinsi	40%
3	Penduduk desa/dusun/asal-usul	21%
4	Anggota komunitas suku/etnis	22%
5	Anggota komunitas keagamaan	31%
6	Anggota/Pendukung partai tertentu	20%
7	Anggota kelas social	36%

**Tabel 16.** Publik mengidentifikasi diri

NO	IDENTITAS	PERSEN RESPONDEN
1	Penduduk Indonesia	44%
2	Penduduk kabupaten/kota/provinsi	29%
3	Penduduk desa/dusun/asal-usul	22%
4	Anggota komunitas suku/etnis	53%
5	Anggota komunitas keagamaan	66%
6	Anggota/Pendukung partai tertentu	46%
7	Anggota kelas sosial	25%

Penilaian para alumni terhadap menonjolnya peran sentimen etnis dan agama di kalangan publik, di satu sisi, dan relatif kuatnya sentimen kebangsaan di kalangan alumni CEFIL, di lain sisi, seolah-olah menjadi sebuah pengakuan bahwa para alumni CEFIL belum berhasil menjalankan perannya sebagai pemimpin di kalangan masyarakat sipil

untuk menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan di kalangan orang kebanyakan. Aktivitas para alumni CEFIL tampaknya lebih tertuju pada penguatan kapasitas diri sendiri dan jejaring antar-aktivis ketimbang menjalankan perannya sebagai pemimpin untuk menumbuhkan kapasitas orang kebanyakan. Hal ini sekaligus menjadi penegas indikasi yang sudah diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa para alumni CEFIL tidak cukup kuat membangun keterkaitan mereka dengan basis-basis masyarakat yang menjadi konstituen mereka, dan lebih cenderung memperkuat ikatan jejaring di antara aktivis NGO.

## SALURAN PENGADUAN PUBLIK

Data tentang ke mana publik mengadukan masalahnya memperlihatkan hal yang menarik. Menurut keterangan para alumni yang menjadi responden, LSM atau CSO merupakan tempat paling kerap yang dituju publik untuk mengadukan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pihak lain yang juga sering dijadikan tumpuan adalah media massa, tokoh informal, dan memanfaatkan media sosial. Kecenderungan terhadap lembaga-lembaga publik formal justru tergolong rendah, rata-rata di bawah 10 persen. Mendasarkan diri pada data ini, ada dua kemungkinan yang dapat kita jadikan kesimpulan sementara.

Pertama, lembaga-lembaga pengaduan publik yang formal belum bekerja dengan baik dan memperoleh kepercayaan publik, sehingga orang-orang lebih memilih pihak lain.

Curah gagasan melalui kartu (meta card) merupakan salah satu metode menggali pemikiran kritis dalam CEFIL.



Kedua, orang kebanyakan cenderung mencari pihak lain untuk menjadi mediator yang diharapkan menyampaikan pengaduan mereka ke lembaga-lembaga formal demokratis. Kedua-dua kemungkinan itu, bagaimanapun, menegaskan kekuatan posisi NGO dan CSO di mata publik.

Setidaknya, begitulah persepsi subjektif para alumni CEFIL yang menjadi responden. Persoalannya, seberapa meyakinkankah persepsi itu? Jika dikaitkan dengan pemaparan data-data mengenai kapasitas politik yang mengindikasikan posisi para alumni CEFIL sebagai aktivis-aktivis sosial yang mengambang dari basis konstitutenya, tampaknya kita perlu sedikit lebih kritis menilai data terakhir ini.

**Tabel 17.** Saluran pengaduan masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

NO	SALURAN PENGADUAN	PERSEN
1	Media massa	16%
2	Media sosial	11%
3	LSM atau CSO	20%
4	Kelompok penekan	7%
5	Kelompok kepentingan	6%
6	Partai politik	1%
7	Anggota parlemen	7%
8	Pejabat pemerintah hasil pemilihan	5%
9	Pejabat birokrasi	3%
10	Lembaga semi-pemerintah	4%
11	Lembaga penegak hukum	4%
12	Tokoh informal	11%
13	Kerabat, keluarga	5%
14	Lain-lain	2%
<b>Total</b>		<b>100%</b>

# KESIMPULAN

1. Demokrasi elektoral di tingkat lokal – tempat di mana para alumni CEFIL - SATUNAMA berkiprah – telah membuka peluang sangat besar bagi elite politik dan elite ekonomi untuk membangun struktur kekuasaan elitis dan oligarkis di tingkat lokal. Kekuatan elitis dan oligarkis memanfaatkan sepenuhnya peluang-peluang yang terbuka itu untuk kepentingan mereka sendiri dengan hampir-hampir tanpa tandingan selama satu setengah dasawarsa terakhir.
2. Elite-elite sosial lokal – yang terutama merupakan kekuatan berbasis massa primordial – menjadi rekanan yang diperlukan bagi persekutuan elitis dan oligarkis itu demi dua tujuan strategis: (i) untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu; dan (ii) untuk politik perlindungan sosial bagi kelangsungan kekuasaan elitis-oligarkis.

3. Proses-proses politik kekuasaan yang dijalankan oleh aliansi tripartit antara elite politik, elite ekonomi, dan elite sosial lokal telah membuat demokratisasi mengarah pada munculnya demokrasi massa. Inilah jenis demokrasi yang hanya mengandalkan jumlah suara, bukan kualitas suara – demokrasi yang berbasis “noise,” bukan “voice.” Demokrasi semacam ini sangat rawan dengan konflik horisontal karena kekuatan-kekuatan massa sangat mudah dimanipulasi oleh sentimen-sentimen primordial dan politik identitas. Demokrasi massa juga berpotensi merusak *citizenship*, mendistorsi kebebasan sipil, serta mencegah berkembangnya *civic-participation*.
4. Struktur monopolis yang tercipta oleh aliansi tripartit itu telah menciptakan relasi-relasi kekuasaan yang tidak seimbang, khususnya dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Secara keseluruhan, masyarakat sipil sendiri – khususnya sebagaimana yang disaksikan oleh para alumni CEFIL di tingkat lokal – memiliki kapasitas politik dan sumber kekuasaan yang terbatas. Akibat dua faktor inilah mereka terus berada pada posisi marginal. Dalam dinamika politik lokal, mereka juga cenderung dieksklusi, diokupasi, atau bahkan dicaplok untuk sekadar menjadi kepanjangan tangan kekuatan-kekuatan monopolis aliansi elite tripartit itu. Situasi ini menyebabkan mereka dalam posisi yang sesungguhnya amat rawan. Alih-alih bisa menggalang inisiatif untuk lahirnya praktik demokrasi alternatif, mereka bahkan cenderung digusur dari seluruh proses politik dan hanya terisolasi dalam ruang publik politik yang pengap.
5. Benar bahwa Alumni CEFIL-Panjang Yayasan SATUNAMA cukup berhasil memproduksi jenis-jenis kepemimpinan dalam masyarakat-politik lokal sesuai dengan tujuan pelatihan yang dirumuskan sejak 1998. Mereka terlihat konsisten bekerja di wilayah masyarakat sipil dan memiliki kekuatan jejaring yang kuat. Ini adalah potensi kekuatan sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

6. Akan tetapi studi ini juga memperlihatkan bahwa gejala penguatan kapasitas alumni CEFIL sebagai pemimpin-pemimpin di dalam masyarakat sipil tidak serta-merta memperkuat masyarakat sipil itu sendiri. Bahkan, jejaring gerakan sosial yang dibangun cenderung terlepas dari basis massa. Mereka mewujud menjadi sebuah lapisan elite baru di tengah masyarakat sipil, yang tidak juga memiliki akses dan kapasitas yang memadai untuk menyambungkan isu dan kepentingan masyarakat ke dalam arena-arena politik pengambilan keputusan.
7. Dengan situasi semacam itu, alumni CEFIL sebagai bagian dari gerakan sosial ikut termarginalisasi dari proses-proses politik yang, seperti diterangkan di atas, dikuasai dan dimonopoli oleh kekuatan-kekuatan elite-oligarkis.

## REKOMENDASI

1. Agenda demokratisasi dengan melibatkan peranan maksimal masyarakat sipil masih tetap layak diperjuangkan. Tetapi melihat keadaan di mana masyarakat sipil berada dalam posisi marginal saat ini, agenda besar yang perlu diprioritaskan adalah melakukan pemberdayaan kembali masyarakat sipil, khususnya dengan cara membangun basis-basis kekuatannya di tingkat lokal.
2. Dalam hubungan ini, salah satu celah strategis yang perlu mendapatkan perhatian adalah memetakan isu-isu strategis di tingkat lokal sambil membangun jaringan dan relasi organik dengan komunitas-komunitas pengusung isu-isu strategis itu. Seperti diulas dalam temuan survey, para pemimpin masyarakat sipil lokal masih memiliki kekuatan pada jaringan sosial dan sebagian dukungan massa. Modal ini perlu dikembangkan lebih jauh dengan tujuan pokok untuk memperkuat sektor-sektor paling penting di setiap wilayah lokal yang selama ini mereka kelola.

3. Aktor-aktor masyarakat sipil juga punya peranan sangat strategis dalam pembangunan landasan sosial-kultural demokrasi yang berorientasi pada kewarganegaraan. Sebagaimana terlihat dalam temuan survey, sementara proses-proses politik lokal berkembang menuju demokrasi massa dengan basis politik identitas demi tujuan-tujuan mobilisasi elektoral, gagasan-gagasan kewarganegaraan politik (*political citizenship*) cenderung tidak berkembang. Ide-ide tentang kebebasan sipil, partisipasi sipil, dan perluasan ruang publik politik yang bersifat *civic*, harus diperkuat kembali. Tetapi kini kebebasan sipil dan partisipasi *civic* juga harus diberi fokus baru agar menyentuh isu-isu ketidakadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, khususnya di tingkat lokal. Seperti sudah dimahfumi, praktik-praktik korupsi politik, korupsi birokratik, dan korupsi korporatis berlangsung secara makin destruktif terhadap sumberdaya alam lokal. Hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap banyak kelompok masyarakat lokal terjadi secara massif, bahkan berdampak serius mengancam sumber kehidupan mereka. Karena itu perhatian baru harus ditekankan untuk melibatkan masyarakat lokal korban kejahatan korupsi itu dalam setiap agenda penguatan masyarakat sipil. Dengan kata lain, kewarganegaraan ekonomi dan sosial (*economic and social citizenship*) harus diberi aksentuasi yang lebih maksimal.
  
4. Yayasan SATUNAMA perlu menciptakan *pilot-pilot project* untuk tugas ini di wilayah yang cukup tersebar tetapi tidak terlalu banyak. Setiap *pilot project* harus didesain sedemikian rupa sehingga mewakili satu-dua isu-isu tunggal dan satu-dua komunitas-komunitas tunggal paling strategis untuk diberdayakan dengan maksimal. Orientasi ke bawah, khususnya ke isu-isu tunggal dan komunitas-komunitas kepentingan spesifik, sejauh ini seperti tugas yang diabaikan dan tidak ditangani secara tuntas, padahal ini bisa menjadi basis untuk membangun posisi-tawar politik yang kuat dalam rangka kontestasi lokal. Setidaknya untuk memperluas wilayah-wilayah pembebasan dari agresi-okupasi kekuatan-kekuatan tripartit monopolis para aktor dominan.



5. Selain itu Yayasan SATUNAMA perlu memberikan perhatian yang cukup untuk merekrut dan menggalang kader-kader baru yang memiliki pemahaman dan keterampilan politik yang memadai untuk ikut mendorong kemajuan proses demokratisasi. Model pelatihan CEFIL sebagaimana yang pernah dilakukan di masa lalu perlu dihidupkan kembali dan dikembangkan dengan desain kurikulum baru yang mencakup materi-materi pendukung keberhasilan *pilot-project*. Untuk itu, perekrutan peserta pelatihan juga harus dilakukan berbasis kebutuhan yang nyata di lapangan.

## KEPUSTAKAAN

- Cho, Hee Yeon, Lawrence Surendra, Eunheong Park [eds.] (2008), *States of Democracy, Oligarchic Democracies and Asian Democratization* (Mumbai, India: Earthworm Book).
- Demos (2004), "1<sup>st</sup> Round Study of the Problems and Options of Indonesian Democratisation," Demos in Cooperation with the Local Politics and Democratisation Network - University of Oslo, ISAI, KontraS and Interfidei, supported by NORAD (Norwegian Agency for development Cooperation), SIDA (The Swedish Agency for Development Cooperation, Ford Foundation, TIFA Foundation).
- Demos (2005), *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia*. (Jakarta: Demos).
- Hadiz, Vedi R; Richard Robison (2004), *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: RoutledgeCurzon).
- Klinken, Gerry van (2006), "Patronage Democracy in Provincial Indonesia," a paper for CPD Network Conference, *Rethinking Popular Representation*, Javnaker, Norway, 25-28 October 2006.
- Mietzner, Marcus (2012), "Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society," *Democratization*, Vol. 19, No. 2, pp. 209-229.
- Samadhi, Willy Purna & Nicolaas Warouw [eds.] (2009), *Demokrasi di Atas Pasir— Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi Indonesia*. (Jakarta, Yogyakarta: Demos & PCD).
- UGM-UIO (2014), "Hasil Survei Demokrasi (Baseline Survey Democracy)" (Yogyakarta: PWD-UGM).
- Törnquist, Olle, Neil Webster, Kristian Stokke [eds.] (2009), *Rethinking Popular Representation* (New York: Palgrave Macmillan).
- Webb, Jen, Tony Schirato & Geoff Danaher (2002), *Understanding Bourdieu*, Allen & Unwin.
- Winters, Jeffrey A. (2013), "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia," dalam AE Priyono & Usman Hamid [eds.] (2014), *Merancang Arah Baru Demokrasi, Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: KPG), akan terbit.

**YAYASAN SATUNAMA**

Jl. Sambu Sari 99, Duwet Rt.07/34

Sendangadi, Mlati, Sleman

Yogyakarta 55285

Telp. (0274) 867745-47, 869045

Fax. (0274) 869044

E-mail: [cefil@satunama.org](mailto:cefil@satunama.org)

[satunama@satunama.org](mailto:satunama@satunama.org)

Website: [www.satunama.org](http://www.satunama.org)

[www.cefil.info](http://www.cefil.info)